

BAB II

KEBIJAKAN STRATEGIS JEPANG PERTAHANAN PASCA PERANG DINGIN (1990-2007) SEBAGAI BENTUK ADAPTASI JEPANG TERHADAP DINAMIKA KEAMANAN INTERNASIONAL

1. 1 Dinamika Perubahan Kebijakan Pertahanan Jepang

Setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, Jepang dihadapkan pada Perang Dingin yang dimotori Amerika Serikat dan Uni Soviet. Penandatanganan perjanjian Jepang-Amerika Serikat di San Fransisko tanggal 8 September 1951 dan berlaku efektif pada 28 April 1952 menjadikan Jepang negara yang bergantung dengan Amerika Serikat dalam hal penjagaan pertahanannya. Setelahnya Jepang berkonsentrasi pada pembangunan ekonominya. Dalam hal diplomasi, terutama terhadap lingkungan Asia, Jepang bersikap *low-key*, diplomasi damai, dan *nonassertive*. Sepanjang 1950-1960 kebijakan luar negeri Jepang didasarkan pada tiga prinsip dasar, yaitu kerjasama dengan Amerika Serikat dengan alasan keamanan dan ekonomi, promosi sistem kerjasama perdagangan bebas yang baik demi kepentingan pemenuhan kebutuhan Jepang, dan kerjasama internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹

Pasal 9 dari konstitusi tahun 1947 (diterjemahkan bebas) berbunyi :
“Mengharapkan secara tulus akan perdamaian internasional yang berdasar pada keadilan dan keteraturan, rakyat Jepang selamanya menolak perang sebagai hak berdaulat bangsa dan ancaman atau penggunaan kekuatan sebagai sarana mengatasi pertikaian internasional.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dari paragraph sebelumnya, kekuatan darat, laut, dan udara, seperti halnya potensi perang yang lain, tidak akan pernah dipelihara. Hak belligerency dari negara tidak akan diakui.”

Pasal tersebut membatasi secara konstitusi kesempatan Jepang untuk melakukan pengembangan kapasitas pertahanannya. Perkembangan selanjutnya menunjukkan komitmen Jepang untuk menjalankan pasal 9 konstitusi 1947, karena pada dasarnya pada masa itu keputusan Jepang untuk menjadi negara yang non-ofensif menjadi strategi yang tepat bagi Jepang.

¹ *Foreign Policy of Japan*, diperoleh dari <http://en.wikipedia.org/wiki/foreignpolicyofJapan>, diakses tanggal 28 Oktober 2007, pukul 15.40 WIB.

Pada masa 1970-an, prinsip dasar Jepang tidak berubah, namun memiliki perspektif yang baru, bergantung pada politik praktis yang terjadi di dalam dan luar negeri. Mulai tumbuh tekanan terhadap pemerintah untuk melakukan lebih banyak inisiatif yang independen dari pengaruh Amerika Serikat tanpa mengubah keterikatan dalam segi keamanan dan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Jepang yang tinggi semakin memperkuat tuntutan internal untuk menjadi lebih independen. Perubahan dalam hubungan kekuasaan di lingkup Asia-Pasifik antara Jepang, China, Amerika Serikat dan Uni Soviet menuntut kaji ulang terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat. Konfrontasi Sino-Soviet, hubungan Amerika Serikat-China, pengurangan pasukan militer Amerika Serikat yang cepat di Asia setelah Perang Indocina II, serta ekspansi Uni Soviet ke Pasifik Selatan menuntut evaluasi kembali terhadap posisi Jepang di Asia dalam sektor keamanan. Otonomi kebijakan luar negeri Jepang dipercepat di tahun 1970-an dengan keputusan Amerika Serikat menarik pasukannya dari Indochina. Pada 1979, para pemimpin Jepang menyambut kembali kekuatan militer Amerika Serikat di Asia dan dunia menyusul revolusi Islam di Iran, krisis pengungsi Teheran, dan invasi militer Soviet di Afganistan. Jepang memegang peran penting untuk mengawasi pergerakan Uni Soviet di negara-negara berkembang.²

Di tahun 1980-an pandangan Jepang tentang kebijakan luar negerinya di pengaruhi oleh munculnya pemimpin baru pasca perang dan posisi baru dalam pembuatan kebijakan. Perbedaan dari cara pandang dari para pemimpin yang lebih senior yang masih menduduki kekuasaan dan mempunyai pengaruh dengan generasi yang lebih mudah yang menggantikan mereka memperumit formulasi kebijakan luar negeri. Jepang mulai membangun kebijakan luar negeri yang lebih berani di bawah pimpinan Perdana Menteri Yasuhiro Nakasone. Jepang membangun kerjasama politik dan militer yang lebih erat dengan Amerika Serikat guna mencegah meluasnya pengaruh Uni Soviet. Pengeluaran biaya pertahanan pertahanan Jepang terus tumbuh stabil walaupun ada pembatasan anggaran. Jepang menjadi aktif memberikan bantuan luar negeri kepada negara-negara yang memiliki peran strategik dalam persaingan Timur-Barat.³

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

Di tahun 1990 kebijakan luar negeri yang diambil Jepang seringkali menghindari perubahan yang radikal. Namun tidak dapat dihindari, pertumbuhan ekonomi Jepang yang tinggi meningkatkan independensi Jepang. Tokyo memanfaatkan kekuatan ekonominya untuk memperkuat sektor politik dan memungkinkan memperkuat pengaruh militernya. Kejatuhan Uni Soviet membuat kompetisi ekonomi lebih penting bagi Jepang dibanding kekuatan militer. Di dalam Jepang, kelompok elit dan opini yang populer memberi dukungan yang kuat pada pengembangan ekonomi. Pengaruh Perang Dunia II masih memberi keengganan pada Jepang untuk mengambil peran yang lebih besar dalam sektor militer. Konsensus yang mendukung perjanjian kerjasama dan keamanan tahun 1960 dibuat dengan Amerika Serikat sebagai dasar kebijakan keamanan Jepang pada masa itu. Kenyamanan yang dimiliki Jepang dari sisi keamanan dan kesejahteraan membuat kondisi yang sulit bagi pihak oposisi untuk mencari dukungan bagi perubahan radikal dalam kebijakan luar negeri Jepang. Kejatuhan komunis di Eropa Timur dan kekejaman rezim komunis yang terjadi di Asia pada akhir era 80-an memberi keyakinan lebih besar bagi Jepang untuk tidak beralih ke aliran kiri.⁴

Sementara itu, LDP sebagai partai berkuasa memodifikasi dasar kekuatan politiknya. Di masa 1980-an, tampak nyata pergeseran komposisi sosial dukungan dari kepercayaan konservatif tradisional atas kepentingan bisnis dan masyarakat perdesaan untuk memasukkan tiap-tiap kategori yang memiliki hak pilih. Pergeseran ini diakibatkan oleh usaha dari politikus di LDP untuk menyusun berbagai kepentingan lokal yang menguntungkan untuk mendukung calon dari LDP. LDP telah mengumpulkan calon-calon dan kelompok pendukung mereka dan telah mencapai suatu konsensus kebijakan untuk mengejar pembangunan ekonomi selagi dalam segi keamanan masih tergantung betul-betul pada payung keamanan Amerika Serikat. Di tahun 1989, Partai Sosialis Jepang sebagai partai oposisi memenangkan kontrol di *House of Councillors*. Namun, ideologi partai tersebut untuk mengubah haluan kebijakan luar negeri Jepang tampaknya lebih kuat dibanding asset yang dimiliki untuk masuk dalam pemilihan house of representative di tahun 1990 dan partai terlihat bermaksud mengubah beberapa

⁴ *Ibid.*

posisi yang telah ada untuk mendukung maksudnya mendorong Jepang beralih ke haluan kiri. Berlawanan dengan Partai Sosialis Jepang, Perdana Menteri Jepang masa itu PM Toshiki Kaifu (1989-1991) dari LDP memanfaatkan wacana hubungan dengan Amerika Serikat dan Barat yang membawa LDP sukses dalam melanjutkan kontrol di parlemen pada Februari 1990.⁵

Sebagai negara dengan bentuk kekaisaran, yang bertanggung jawab penuh terhadap kebijakan luar negeri Jepang adalah Kabinet Jepang yang dipimpin oleh seorang perdana menteri sesuai dengan konstitusi 1947. Kabinet tersebut diawasi sepenuhnya oleh *National Diet*. Perdana Menteri diharuskan melapor secara periodik kepada *National Diet* yang memiliki komite urusan luar negeri, baik di Majelis rendah maupun Majelis Tingginya. Masing-masing komite melaporkan pertimbangannya ke majelisnya masing-masing dalam sebuah sidang pleno. Anggota *Diet* memiliki hak interpelasi untuk mengajukan pertanyaan berhubungan dengan kebijakan kepada menteri luar negeri atau kepada perdana menteri. Perjanjian dengan negara luar memerlukan persetujuan *Diet*. Sebagai orang yang dominan dalam politik negara, perdana menteri memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan final berhubungan dengan kebijakan luar negeri yang diambil negara. Menteri luar negeri bertindak sebagai penasihat bagi perdana menteri dalam hal rencana dan implementasi. Menteri luar negeri didampingi oleh dua orang wakil menteri, yaitu yang membidangi urusan administrasi, dipilih dari pegawai senior di kementerian luar negeri dan satu lagi yang memiliki wewenang hubungan politik dengan *Diet*.⁶

Dalam perkembangan kebijakan pertahanan Jepang, terdapat beberapa hal yang dapat dianggap sebagai catatan penting hingga perubahan kebijakan pertahanan Jepang masa tahun 2000-an yang mulai tampak memperbesar armada pertahanannya.

Diawali oleh doktrin Yoshida, yang memiliki tiga pokok kebijakan penting Jepang di bidang pertahanan, yaitu :

1. Untuk meletakkan postur internasional Jepang di bawah pertumbuhan ekonomi nasional
2. Untuk memelihara sikap low profile dalam masalah internasional

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

3. Untuk bergantung pada kemampuan pertahanan diri moderat dikombinasikan dengan jaminan keamanan AS

Terjadinya Perang Korea tahun 1951 memunculkan dorongan Amerika Serikat kepada Jepang untuk menyediakan 75.000 orang *National Police Reserve* yang menjadi cikal bakal *Self Defence Force* Jepang. Kemunculan SDF dan program pertahanan melahirkan kebutuhan pembentukan kebijakan pertahanan dalam batasan konstitusi. Prinsip-prinsip dari kebijakan tersebut dikenal dengan *basic policy for national defence* atau Kebijakan Dasar Pertahanan Nasional Jepang.

Pada 20 Mei 1957, kabinet menyetujui Kebijakan Dasar Pertahanan Nasional Jepang yang diadopsi oleh *National Defence Council*. Kemunculan kebijakan dasar tersebut menjadi awal bagi Jepang untuk kembali memberi perhatian pada masalah pertahanannya, walaupun secara eksplisit tidak menunjukkan indikasi untuk melakukan pengembangan sektor pertahanan. Tujuan pertahanan nasional adalah untuk mencegah agresi langsung maupun tidak langsung dan untuk menolak segala jenis agresi untuk tujuan melindungi kemerdekaan dan perdamaian Jepang yang berdiri di atas demokrasi. Untuk mencapai hal tersebut, kebijakan dasar yang dibuat dinyatakan sebagai berikut :⁷

1. Untuk mendukung aktivitas Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mempromosikan kerjasama untuk mencapai perdamaian dunia.
2. Untuk menstabilisasi kehidupan umat manusia, mempromosikan patriotism mereka, dan membangun dasar-dasar yang dibutuhkan bagi keamanan nasional.
3. Dalam batas yang dibutuhkan untuk pertahanan diri, secara progresif membangun kapabilitas pertahanan yang efisien disesuaikan dengan kekuatan negara dan situasi yang ada.
4. Menghadapi ancaman agresi eksternal berdasarkan kerjasama keamanan Jepang-AS hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat menjalankan fungsinya secara efektif untuk mencegah segala bentuk ancaman dimasa mendatang.

⁷ Diperoleh dari www.mofa.go.jp. Diakses tanggal 28 Mei 2008, pukul 16.30 WIB.

Kebijakan dasar Jepang di bidang pertahanan tersebut menjadi tuntunan bagi Jepang dalam membuat keputusan-keputusan yang berhubungan dengan masalah pertahanan negaranya. Penyerahan sepenuhnya masalah pertahanan kepada Amerika Serikat adalah tindakan yang dinilai tepat dilakukan saat itu karena secara ekonomi Jepang sedang melaksanakan pembangunan ekonominya, sementara itu pengaruh trauma perang yang membuat Jepang memiliki citra sebagai penjajah dapat diminimalisir.

Secara garis besar dapat dilihat bahwa pada masa perang dingin dalam hal pertahanan, Jepang harus mempertahankan tingkat dasar kemampuan pertahanan yang konsisten dengan pasal 9 konstitusi Jepang dan bergantung pada kerjasama pertahanan Jepang AS pada kejadian apapun selain daripada ancaman pertahanan tingkat paling rendah. Hal yang perlu diperhatikan dari kebijakan pertahanan Jepang pada masa perang dingin ini adalah focus yang masih berpusat pada keamanan dalam negeri semata. Jepang pada masa perang dingin masih mengedepankan strategi keamanan nasional yang semata-mata berupaya mencegah masuknya ancaman mencapai Jepang, dalam hal ini dengan memperkuat kemampuan pertahanan dalam negeri dan pembentukan aliansi keamanan dengan AS. Upaya Jepang untuk lebih memperhatikan situasi keamanan secara menyeluruh dan mengupayakan kerjasama dengan negara-negara lain untuk mencegah munculnya ancaman sejak awal sebagai bagian dari strategi keamanan internasional belum begitu terlihat. Selain itu, situasi perang dingin yang diwarnai *détente* antara AS dan Uni Soviet membuat Jepang melihat bahwa situasi yang cenderung damai tidak menunjukkan adanya pengaruh ancaman berarti yang akan menyerang Jepang secara langsung. Jepang melihat AS sebagai kekuatan yang akan mampu melindungi Jepang dari ancaman eksternal dan bergantung semata pada aliansi keamanan dengan AS untuk mengatasi segala ancaman.⁸

Kritikan keras datang dari Amerika Serikat saat Jepang menolak membantu Amerika Serikat saat terjadi perang teluk. Kebijakan tersebut diambil karena alasan Jepang terikat dengan Pasal 9 konstitusi 1947. Jepang hanya bersedia menanggung biaya operasional pasukan multinasional. Setelah tekanan

⁸ Dirangkum dari penelitian Rahmatia Nara Marista berjudul *Penyesuaian Kebijakan Jepang Terhadap Dinamika Keamanan Kawasan Asia Timur*, Universitas Indonesia, 2006, hal 128.

Amerika Serikat demikian besar terhadap Jepang, barulah Jepang mengirimkan kapal penyapu ranjau dan dilakukan saat ketegangan di Teluk telah mereda.

Akibatnya, kalangan elit Amerika Serikat menganggap Jepang tidak dapat diandalkan sebagai sekutu dan berpendapat bahwa Jepang terlalu diuntungkan dengan payung keamanan Amerika Serikat, sehingga harus menanggung biaya militer yang berat dan mengganggu pertumbuhan ekonominya.

Jepang menyadari perkembangan wacana yang dibuat Amerika Serikat membahayakan hubungan aliansinya. Kekhawatiran Jepang adalah apabila terjadi konflik di kawasan yang membahayakan kepentingannya, Amerika tidak mau membantunya, sementara itu pertahanan diri yang dimiliki Jepang masih di bawah standard. Juga Jepang mengkhawatirkan akan mengalami kesulitan untuk bertindak jika terjadi konflik yang tidak berada dalam wilayah teritorialnya, namun bertendensi mengancam eksistensi Jepang. Dengan kata lain, Jepang melihat makin menurunnya komitmen Amerika Serikat terhadap Jepang dalam hal perlindungan keamanan setelah Perang Dingin berakhir. Kekhawatiran Jepang makin bertambah saat Korea Utara melakukan percobaan rudal Tae podong yang melewati wilayah teritorial Jepang.⁹

Karena hal tersebut, Jepang membuat kebijakan penggunaan fasilitas pelabuhan laut dan udara militer dan sipil Jepang untuk mendukung kapal-kapal serta pesawat-pesawat tempur Amerika Serikat. Selain itu Jepang memberi dukungan di garis belakang terhadap aliansinya dengan member pasokan minyak, transportasi personel militer ke kapal-kapal perangnya, perbaikan dan pemeliharaan kapal-kapal dan pesawat-pesawat tempur, menjaga keamanan fasilitas-fasilitas militer, telekomunikasi sampai pada pengumpulan data-data intelijen, operasi menyapu ranjau dan menjamin keselamatan navigasi.¹⁰

Perubahan kebijakan Jepang tersebut mendapat perlawanan dari beberapa partai, terutama partai sosialis dan komunis Jepang. Alasan kedua partai tersebut juga didukung oleh sebagian kalangan publik, terutama di daerah Okinawa yang dijadikan pangkalan pertahanan Amerika Serikat dan juga oleh para akademisi

⁹ Aurelia George Mulgan, *Beyond Self Defence, Evaluating Japan's Regional Role Under The New Defence Cooperation Guidelines*, Pasifica Review, Volume 12, Number 3, Oktober 2000, hal. 230.

¹⁰ *Ibid.* hal. 226.

yang mengkhawatirkan bahwa kebijakan yang diambil Jepang tersebut akan menyeret Jepang ke arah militerisasi kembali. Namun ternyata sebagian besar publik Jepang menyetujui kebijakan yang diambil. Publik Jepang menganggap Cina lebih berpotensi sebagai ancaman dibanding Korea Utara. Perkembangan tersebut merupakan hal yang sangat menarik karena setelah Perang Dunia II publik Jepang sangat tidak mendukung segala tindakan yang berimplikasi terhadap peningkatan peranan dan kekuatan *Self Defence Force*.

Implikasi dari kebijakan yang diambil tersebut terhadap *Self Defence Force* sangat signifikan. Jepang turut berpartisipasi aktif dalam operasi non tempur bersama-sama Amerika dan melakukan dukungan logistik walaupun dari garis belakang pada situasi konflik. Jepang juga berperan dalam perencanaan kebijakan operasional dengan Amerika Serikat sebagai aliannya, sehingga Jepang dapat memasukkan kepentingan-kepentingannya dalam kerangka aliansi. Kebijakan yang diambil Jepang untuk mengubah perjanjian dengan aliannya menetapkan kewajiban bagi Jepang untuk membantu bila terlibat dalam konflik di daerah sekitar Jepang. Bentuk Aliansi yang dibangun Jepang tersebut lebih menyerupai suatu *collective defence*.¹¹

Hal ini berarti secara implisit memperbolehkan Jepang mengirimkan pasukannya ke luar wilayah teritorialnya. Meskipun tidak dalam kerangka operasi militer tersebut, bukan tidak mungkin Jepang dapat terseret secara tidak sengaja ke dalam konflik. Terjadi pergeseran desain *Self Defense Force* yang sangat penting dengan pengiriman pasukan ke luar wilayah teritorial Jepang. Secara substansi, perubahan tersebut telah melanggar pasal 9 konstitusi 1947, namun dalam ketetapan perubahan kebijakan tersebut kabinat hanya perlu melaporkan kepada Diet rencana yang dibuat dan diterapkan dalam rangka komitmen Jepang terhadap Amerika dalam konteks kerjasama keamanan. Dalam perkembangannya Diet melakukan studi terhadap kemungkinan amandemen pasal 9 konstitusi 1947 tentang kemungkinan amandemen pasal tersebut agar perluasan peranan Jepang memiliki legalitas yang kuat, namun dalam Diet sendiri hal tersebut mendapat tentangan, termasuk juga dari public Jepang dan kalangan akademisi. Sebelum usaha amandemen pasal 9 konstitusi 1947 berhasil dilakukan, pemerintah

¹¹ Hasil penelitian Feri Akbar, *Revisi Aliansi Pertahanan Amerika Serikat-Jepang*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.

diwajibkan melaporkan dan meminta persetujuan terlebih dulu kepada Diet sebelum menjalankan komitmen-komitmen regional Jepang. Hal tersebut menjadi pengecualian jika Jepang berada dalam kondisi darurat.¹²

Perubahan kebijakan Jepang dalam kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat berupa revitalisasi pasukan pertahanannya mendorong Jepang meningkatkan anggaran militernya karena dibutuhkan untuk melakukan riset dan pengembangan teknologi militer. Kedua hal tersebut diperlukan bagi pasukan pertahanan Jepang yang selama ini berada dalam status quo, terutama untuk memperluas jarak tempuh kapal-kapal dan pesawat-pesawat tempur Jepang. Suatu hal yang juga menjadi catatan penting dari perubahan kebijakan dalam kerjasama pertahanan tersebut adalah kesediaan Jepang untuk ikut dalam program TMD. TMD merupakan suatu system pertahanan anti rudal balistik yang terdiri dari system anti rudal yang berbasis di darat dan laut (*Navy Theater Wide Defence System/NTW*).¹³ Dengan keikutsertaan tersebut, Jepang terlihat merubah karakteristik pasukan pertahanannya menjadi tampak ofensif.

Revisi kebijakan pertahanan Jepang terhadap Amerika dalam bentuk perjanjian kerjasama keamanan tersebut resmi disetujui oleh pemerintah Amerika dan Jepang tahun 1997 dan bulan Mei 1999 Diet mengesahkan perberlakuan kebijakan Jepang di bidang kerjasama pertahanan tersebut.

Sementara itu, NDPO yang dibuat pada 1957 mengalami revisi di tahun 1996 karena tuntutan perubahan dinamika pertahanan dan keamanan negara dalam lingkup nasional, regional, maupun internasional pasca Perang Dingin.

Selanjutnya NDPO yang direvisi tahun 1996 itu direvisi kembali. *Security Council* dan Kabinet setuju untuk mengubah acuan pertahanan Jepang tersebut pada 10 Desember 2004 dan menjadi *National Defence Program Guidelines* untuk tahun 2005. Tujuan Jepang mengeluarkan NDPG tersebut adalah dalam rangka menjaga keamanan Jepang dan perdamaian serta stabilitas masyarakat internasional dan memberi jaminan kondisi aman seperti yang telah ada di Jepang selama ini. Kebijakan tersebut berdasarkan pada “*On Introduction of Ballistic*

¹² Neil E. Silver, *The United States, Japan and China : Setting The Course*, diakses dari http://www.cfr.org/public/pubs/us_jap_china.html, hal. 24.

¹³ Shinichi Ogawa, *TMD and Northeast Asian Security*, National Institute For Defence Studies (NIDS), Japan 2000, hal.4.

Missile Defence System and Other Measures” yang diputuskan oleh *Security Council* dan kabinet Jepang pada 19 Desember 2003.

Untuk merespon peristiwa 9/11 dalam lingkup keamanan internasional, maka Jepang merancang NDPG (*National Defence Policy Guide*) pada Desember 2004 sebagai sebuah dokumen yang menyatakan dasar kebijakan pemerintah Jepang dalam hal keamanan, signifikansi, dan peran kemampuan pertahanan, dan penuntun dasar bagi pengembangan kemampuan pertahanan di masa mendatang.

Sebagai tambahannya, pemerintah Jepang merancang MTDP (*Mid-Term Defence Program*) untuk mencapai tingkat kemampuan pertahanan yang telah dirancang dalam NDPG. Kemampuan pertahanan dikembangkan sesuai dengan yang tercantum dalam MTDP.

Untuk melindungi negara dan rakyat jika terjadi serangan terhadap Jepang, pemerintah telah membuat kerangka kerja dasar dalam bentuk legislasi darurat. Kemudian, untuk memperkuat postur pertahanan guna menghadapi kejadian yang tak terduga dan membangun kerangka kerja untuk terlibat atas inisiatif sendiri secara proaktif bagi perdamaian dan stabilitas masyarakat internasional, pemerintah Jepang memasukkan draft pengajuan ke Diet pada 9 Juni 2006 yang memuat perubahan dari Badan Pertahanan menjadi Departemen dan meningkatkan peran dalam aktivitas kerjasama perdamaian internasional sebagai misi utama SDF.¹⁴

Jika dibandingkan dengan dasar kebijakan yang dikeluarkan pada 20 Mei 1957 tentang kebijakan dasar pertahanan nasional, akan terlihat bahwa kebijakan pertahanan yang dikeluarkan Jepang pasca Perang Dingin (2007) mengarah pada pengembangan kekuatan militer.

Tampak bahwa pada masa sebelumnya Jepang terikat dengan prinsip Pasifis, sehingga kecenderungannya adalah menjadi negara yang ‘aman’. Dengan perkembangan yang terjadi dari kebijakan luar negeri Jepang di bidang pertahanan yang dituangkan dalam Buku Putih Pertahanan Jepang, secara implisit Jepang menyiapkan diri jika sewaktu-waktu ada ancaman datang dengan meningkatkan kekuatan militernya. Jepang berusaha menampilkan bahwa negaranya hanya ingin menjadi negara ‘normal’ dan tidak ingin menjadi ancaman dan bahwa kebijakan

¹⁴ *Ibid.*

untuk mengubah postur pertahanannya hanyalah hal ritual yang juga dilakukan oleh negara-negara lain.

Dalam NDPG tahun 2005 Jepang memaparkan kondisi yang ada dalam lingkup keamanan lingkungan di luar Jepang. Pandangan Jepang bahwa untuk menghadapi interdependensi yang meningkat dan pertumbuhan globalisasi, masyarakat internasional menghadapi ancaman baru dan situasi yang beragam berhubungan dengan perdamaian dan keamanan, termasuk proliferasi senjata pemusnah massal, misil balistik, dan juga aktivitas terorisme internasional. Karena itu, menurut pengambil kebijakan Jepang bentuk *deterrence* konvensional sudah tidak tepat lagi diterapkan dalam lingkungan dunia dengan tantangan ancaman yang makin beragam, terutama ancaman organisasi teroris internasional yang tidak mempertimbangkan perlindungan pada negara, terutama pada warga negara negara yang bersangkutan. Sepuluh tahun setelah berakhirnya Perang Dingin, kerjasama dan interdependen antar negara-negara besar makin tinggi. Penggunaan kekuatan militer memainkan peran yang lebih besar dalam masyarakat internasional, lebih dari sekedar deterring atau respon terhadap konflik senjata. Jepang memandang adanya indikasi dari negara-negara di sekitar untuk mengembangkan pertahanan negara mereka. Selain itu, Jepang juga melihat kekuatan militer sebagai alat yang juga digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pencegahan konflik atau untuk bantuan kemanusiaan.

Dikarenakan makin meluasnya dan makin tingginya interdependensi diantara negara-negara, usaha yang lebih besar juga perlu dilakukan untuk mempromosikan dan memperkuat koordinasi dan kerjasama bilateral dan multilateral di kawasan Asia Pasifik. Dalam mempertimbangkan masalah keamanan Jepang perlu juga mempertimbangkan kondisi Jepang yang ada, termasuk didalamnya keterbatasan Jepang dalam masalah strategi, garis pantai yang panjang dan banyak pulau kecil, kepadatan penduduk yang tinggi, konsentrasi populasi dan industry di daerah perkotaan, dan banyak fasilitas penting di wilayah pantai. Selain itu, kondisi Jepang dengan bencana alam yang rutin terjadi karena kondisi alam dan iklimnya dan faktor komunikasi yang sangat penting bagi pertumbuhan negara dan kesejahteraan rakyat menjadi juga faktor yang dipertimbangkan dalam kebijakan Jepang soal keamanan.

Terdapat isyarat-isyarat dari banyak negara yang mendorong Jepang untuk makin aktif melakukan peran politik yang makin menyeluruh di dunia. Tampaknya pendapat umum di Jepang pun makin mendukung adanya peranan politik lebih besar yang harus dimainkan oleh negaranya. Dengan kata lain, secara berangsur-angsur telah terjadi perubahan di dalam filosofi pemisahan ekonomi dan politik. Hal itu selayaknya memang demikian. Jepang harus makin sadar bahwa dirinya bukan saja merupakan suatu kekuatan ekonomi tapi juga ia memiliki pengaruh dan tanggung jawab politik di dunia ini.

Implementasi dari pergeseran ini, Jepang melaksanakan kebijakan luar negeri yang berarah banyak (*omni directional Foreign Policy*). Jepang menentukan skala prioritas mengenai peranan politik yang dimainkannya. Prioritas ini dapat ditentukan hanya atas dasar suatu pandangan yang menyeluruh, misalnya AS menempati urutan pertama sebagai sekutu strategis Jepang, baru kemudian Jepang memiliki ikatan yang lebih besar dengan China daripada kepada Rusia.

Prinsip-prinsip dasar kebijakan pertahanan Jepang yaitu pertama, mencegah segala ancaman terhadap Jepang, dan jika terjadi ancaman maka Jepang akan memukul mundur penyerang dan meminimalisir kerusakan yang diakibatkan. Kedua, memperbaiki lingkungan internasional dalam rangka mengurangi ancaman yang mencapai Jepang. Jepang akan mencapai tujuannya tersebut dengan usahanya sendiri, bekerjasama dengan Amerika Serikat sebagai partner keamanan Jepang, dan dengan masyarakat internasional.

Jepang akan mendukung kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk misi perdamaian dan keamanan, membuat hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, membangun hubungan yang lebih erat dengan Amerika Serikat berdasarkan perjanjian keamanan Jepang-AS, membangun dasar bagi keamanan nasional dengan mempersiapkan stabilitas politik domestik, dan membangun pasukan pertahanan yang efisien.

Dari pernyataan tersebut tampak perubahan cara pandang Jepang terhadap pertahanan negaranya. Yang semula bersifat *constructive engagement* menjadi lebih konstruktif secara militer.

Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Toshiki Kaifu (1989-1991) yang menjadi perdana menteri pasca Perang Dingin, ia menjadi Perdana Menteri pertama yang meminta maaf atas tindakan Jepang pada masa Perang Dunia II, terutama pada Negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Perdana Menteri berikutnya Kiichi Miyazawa (1991-1993) menampilkan Jepang sebagai negara yang cinta damai. Ia memiliki ide untuk melakukan peningkatan intensitas dialog keamanan dan politik antara negara-negara di kawasan untuk memperkokoh keamanan dan stabilitas di Asia Pasifik, serta untuk merumuskan keamanan kawasan di masa yang akan datang. Selanjutnya, peningkatan derajat keterbukaan perekonomian Asia Pasifik demi mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, upaya aktif mendorong demokratisasi dan pembangunan berkelanjutan, serta kerjasama Jepang-ASEAN untuk membangun perdamaian dan kesejahteraan di wilayah Indocina, termasuk dalam hal membangun forum untuk mendesain strategi pembangunan yang komprehensif.¹⁵

Di masa pemerintahan koalisi Perdana Menteri Morihiro Hosokawa (1993-1994) membuat kebijakan untuk melanjutkan kebijakan LDP untuk tetap melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat di bidang ekonomi dan keamanan, untuk merespon keinginan domestik dan internal Jepang bagi kontribusi yang lebih besar di bidang politik dan ekonomi, dan kerjasama internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi lain untuk perdamaian dunia, perlucutan senjata, bantuan pada negara-negara berkembang, serta kerjasama di bidang pendidikan dan teknik. Pidato-pidato yang memuat kebijakan luar negeri Jepang baik oleh Perdana Menteri maupun Menteri Luar Negeri disebarluaskan secara berkala ke publik, berikut pamphlet, dan buklet. Penyebaran informasi ke publik tersebut ingin menunjukkan kebijakan Jepang yang terbuka dan selain itu dapat melihat respon dari masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kelompok politik yang menjadi oposisi pemerintah menyatakan pandangan mereka secara terbuka melalui partai politik dan media massa yang mengambil sikap sebagai pihak netral. Kelompok oposisi pemerintah umumnya berasal dari golongan kiri yang berusaha memasukkan pengaruhnya melalui wakil

¹⁵ Disarikan dari penelitian Mulyanto Sastrowiranu, *Upaya Jepang Mengatasi Peningkatan Peran China Di Kawasan Asia Timur : Studi Kasus East Asia Summit 2005*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

mereka di Diet, termasuk juga melalui organisasi massa dan terkadang melalui demonstrasi di jalan. Sebagai kebalikannya, kelompok pendukung pemerintah, termasuk di dalamnya kelompok bisnis dan pertanian, membawa tuntutan pada Perdana Menteri, anggota kabinat, dan anggota Diet umumnya melalui negosiasi dan kompromi tertutup.

Perdana Menteri Shinzo Abe (2006-2007), berusaha memperbaiki ketidakseimbangan antara kekuatan ekonomi dengan perlindungan kepentingan Jepang di luar negeri melalui penguatan dalam diplomasi luar negeri dan militer. Kebijakannya ini akan memuaskan berbagai kalangan di dalam negeri, namun membuat negara lain berharap cemas.

Jepang telah menjadi kekuatan ekonomi nomor dua terbesar di dunia. Perusahaannya beroperasi mulai dari Brasil sampai Mongolia, dari Norwegia sampai ke Pasifik Selatan. Jepang menjadi salah satu pemberi pinjaman terbanyak di dunia dan pemberi kontribusi dana terbesar bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa sehingga bisa terus berfungsi. Di balik fakta itu, Jepang tidak memiliki kemampuan politik maupun militer yang memadai untuk melindungi kepentingannya diseberang lautan. Undang-Undang Jepang telah mengekang penambahan kekuatan militer sehingga tidak pernah memiliki *blue ocean marine* atau pesawat pengebom tempur jarak jauh. Kontribusinya terhadap perwujudan demokrasi dan penegakan hak-hak azazi manusia juga nyaris kurang berarti.

Abe, sebagai Perdana Menteri pertama yang lahir setelah Perang Dunia II berusaha memperbaiki ketimpangan tersebut. Bila melihat ke belakang, gagasan membangkitkan kembali kekuatan militer mengalami pasang surut karena tekanan dari dalam maupun negara lain. Shinzo Abe belum melakukan peningkatan postur militer, tetapi ia memulainya dari bagian paling mendasar. Ia mengubah undang-undang Jepang yang mengedepankan perdamaian kearah yang lebih membuka ruang gerak bagi tindakan militer. Ia juga mengubah status instansi militer tertinggi dari tingkat direktur jenderal menjadi kementerian penuh.

Dua nilai yang dimiliki Jepang, yaitu kerja keras dan patriotisme. Dari sisi Abe, peningkatan postur militer merupakan keharusan karena kepentingan nasional menghendaknya. Hubungan Cina dan Korea Selatan yang tak kunjung

membalik membuat Jepang memerlukan kekuatan untuk melindungi jalur pasok minyak dan gas dari Timur Tengah dan batu bara dari berbagai negara.

Dalam beberapa hal, Jepang tidak dapat mengandalkan Amerika Serikat karena Washington memiliki kepentingan berbeda. Misalnya, dalam mendukung pencalonan Jepang sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Shinzo Abe mesti melaksanakan kebijakan luar negeri dan pertahanan dengan mengandalkan kekuatan sendiri dan peningkatan hubungan dengan Washington. Dengan postur yang lebih kuat, ia akan memainkan hubungan bilateral dengan Cina, Korea Selatan, dan Rusia, tetapi ia tidak dapat meninggalkan persekutuan tradisional dengan Amerika Serikat. Abe bisa jadi lebih maju dari pendahulunya, Junichiro Koizumi (2001-2006) yang dikenal pro Washington.

Shinzo Abe mengatakan bahwa negara-negara lain tidak perlu khawatir atas keputusan negerinya meluncurkan secara penuh lembaga kementerian pertahanan sejak Perang Dunia II.

“Peningkatan dari badan menjadi kementerian tidak berarti sebuah ekspansi anggaran militer atau kekuatan militer,” kata Abe dalam pidato dalam sebuah kelompok pemikir di Tokyo.¹⁶

Menurut Abe, kementerian pertahanan itu tak berarti ancaman kepada kawasan, “Tapi lebih menunjukkan komitmen kami memberikan kontribusi perdamaian dan stabilitas kawasan,” kata Abe.¹⁷

Sementara pada 11 Oktober 2006, Jepang menerapkan sanksi-sanksi baru terhadap Korea Utara, termasuk larangan impor, sebagai tanggapan atas uji coba nuklir mereka. Jepang juga melarang semua kapal-kapal Korea Utara memasuki perairan Jepang. “Untuk melindungi kehidupan dan aset-aset warga Jepang, kami tak dapat mentolerir tindakan yang dilakukan Korea Utara,” merupakan alasan yang dikemukakan PM Shinzo Abe yang melatarbelakangi kebijakan yang diambilnya. Selain itu, menurut Abe hal lain yang mendasari kebijakannya, yaitu “Menimbang meningkatnya kemampuan misil dan nuklir Korea Utara, Jepang menjadi negara yang paling banyak terkena dampaknya dalam pengertian

¹⁶ *Kementerian Pertahanan Jepang Bukanlah Ancaman*, Kompas 16 Januari 2007, diakses pukul 18:26 WIB dari <http://www.tempointeraktif.com/hg/luarnegeri/2007/01/16/brk.20070116-91373.id.html>

¹⁷ *ibid.*

keamanan. Hukuman lain akan diterapkan Jepang bila Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan resolusi baru.

Dalam perbendaharaan kata ada yang disebut sebagai 'kokussaika'. Secara harfiah 'kokusaika' dalam bahasa Jepang artinya adalah internasionalisasi, umumnya diartikan sebagai suatu kesadaran sebagai anggota komunitas dunia. Dan bagaimana mendefinisikan kesadaran itu dalam kehidupan keseharian.¹⁸

Kesadaran tersebut tidak terbatas terhadap pertukaran materil dan cultural, tetapi juga menyangkut interaksi yang lebih luas antara sesama manusia, baik antara sesama warga Jepang maupun yang lainnya. Gerak Abe membawa angin baru dalam ber'kokusaika' yang lebih aktif member substansi diri sebagai salah satu pemain dunia abad 21.

Ketika Shinzo Abe sebagai penerus Koizumi, sejak 28 September 2006, mulai bergerak maju, terungkap gaya barunya dalam kancah dunia internasional. Dalam perjalanan sejarah dunia, paling sedikit terdapat tiga pola kokuisaka dalam tahap perkembangan internasional, yakni pola absorptive-imitative, pola hegemonic-proselytic dan pola contributive-co-existence.

Pola pertama, absorptive-imitative, merupakan pola menyerap-meniru apa saja yang dikembangkan di dunia barat. Pola kedua, hegemonic-proselytic (hegemoni-menjajah), yaitu manifestasi kebijakan dunia Barat dari Spanyol sampai Amerika Serikat sebagai akibat fenomena reformasi sosial dan revolusi industri di barat. Sedangkan pola ketiga menggerakkan suatu budaya dan masyarakat madani yang luas.

Dengan memfokus pada pola ketiga ini, maka Jepang makin bergairah untuk muncul dengan suatu kerangka/formulasi pandangan hidup dengan memiliki cita-cita berperan sebagai kekuatan dunia. Bagi Jepang, apalagi sejak 1990-an, berpacu dengan China dan belakangan India, untuk mampu menjadi salah satu negara adi daya kekuatan materil tidaklah cukup. Kehebatan materil

¹⁸ Bob Widyahartono MA, *Departemen Pertahanan Baru Jepang Dalam Pembaruan 'Kokusaika'*, diakses dari <http://www.tribun-timur.com/view.php?id=43674&jenis=Internasional>

itu harus diperkuat elemen lain, yaitu kultur. Untuk dapat dipahami dan diapresiasi, maka intruduksi kultur dan sikap pandang dunia (world view) hanya dapat dikerjakan atas dasar suatu pemahaman yang mendalam. Kultur membentuk sikap pandang tentang dunia.

Sebelum peranan kelompok Koizumi, karena lemahnya posisi Jepang dalam ber-kokusaika, Jepang selama beberapa dasawarsa pasca Perang Dunia II harus menjalankan 'diplomasi meminta maaf' (apology diplomasi) kepada negara-negara Asia. Setelah 1980-an dan berakhirnya Perang Dingin, Jepang mulai menapak dalam kokusaika *contributive-existence*-nya dari pembiayaan perang menuju pasca perang. Meskipun demikian, Jepang masih mendapat tekanan riil maupun halus agar tidak menjadi salah satu pemimpin dunia. Sebagai bentuk kebijakan Jepang yang berusaha menampilkan negaranya sebagai bukan negara ancaman dan menghapus trauma perang, Junichiro Koizumi saat menjabat PM Jepang dalam Konferensi Asia-Afrika tanggal 22 April 2005 di Jakarta menyatakan permintaan maaf secara terbuka kepada bangsa-bangsa Asia yang diduduki Jepang selama Perang Dunia II. Permintaan maaf ini disertai juga imbauan agar sesama pemimpin Asia memandang ke masa depan dan tidak mengungkit-ungkit sejarah yang sensistif.

Shinzo Abe, sebagai pengganti Koizumi, dianggap juga sebagai reformis yang lahir pasca Perang Dunia II. Ia yang lahir pada 1947 dinilai berbagai kalangan sebagai sosok yang memiliki sikap pandang lebih matang sekaligus visioner dalam membangun kemitraan dengan negara-negara Asia Timur. Kesadaran tulusnya, apalagi sejak Undang-Undang Jepang direvisi dengan mengubah Badan Pertahanan Jepang menjadi kementerian penuh. Keputusan itu sangat didukung oleh sikap optimis berbagai kalangan elite muda Jepang. Shinzo Abe menggaris bawahi posisi baru dasar-dasar pembangunan bangsa Jepang secara lebih riil dalam percaturan internasional, dalam politik ekonomi dan budaya untuk berperan serta mewujudkan perdamaian sekaligus stabilitas.

Dari perubahan kebijakan pertahanan yang dilakukan Jepang pasca Perang Dingin sebagai bentuk kebijakan strategis Jepang dan sebagai kerangka acuannya dalam melaksanakan pertahanan negaranya dapat dibuat suatu mata rantai singkat dinamika perubahan yang terjadi. Dari sisi situasi keamanan internasional dengan

berakhirnya Perang Dingin, maka ancaman konflik tingkat global berkurang. Sebagai konsekuensinya, Jepang harus memikirkan ulang kondisi keamanan kawasannya, karena Amerika Serikat mulai menarik mundur pasukannya dari kawasan Asia. Pada tahun 1996 Jepang mengeluarkan kebijakan pertahanan, yaitu NDPO Tahun 1996 yang merupakan revisi terhadap NDPO Tahun 1976. Sementara itu, di tahun 2005 muncul isu terorisme internasional dengan penyebaran strategi counter-terrorism oleh Amerika Serikat.

Potensi ancaman pada masa setelah Perang Dingin dipenuhi ketidakjelasan dan ketidakpastian. Negara-negara melakukan modernisasi militer. Terjadi pengembangan senjata pemusnah missal dan muncul konflik regional. Bagi Jepang hal tersebut dipandang sebagai potensi ancaman di kawasan dan dimuat dalam NDPO Tahun 1996. Kemudian pada NDPG Tahun 2005 potensi ancaman di kawasan semakin dipenuhi ketidakjelasan dan ketidakpastian. Muncul ancaman nyata senjata pemusnah missal seperti rudal dan nuklir. Terjadi pula sengketa wilayah, termasuk intrusi pihak asing ke wilayah Jepang. Tampak bahwa ancaman Cina dan Korea Utara bagi Jepang semakin nyata.

Strategi pertahanan negara yang diambil Jepang untuk menghadapi potensi ancaman terhadap stabilitas keamanan negaranya yaitu strategi keamanan nasional dengan mencegah ancaman mencapai Jepang secara langsung melalui peningkatan kemampuan pertahanan dan aliansi serta mulai berkontribusi pada keamanan internasional dan kawasan dalam kerangka aliansi. Hal tersebut dimuat dalam NDPO Jepang tahun 2006. Selanjutnya dalam NDPG Tahun 2005 strategi tersebut direvisi menjadi penggabungan dari strategi keamanan nasional dan internasional dengan mencegah ancaman mencapai Jepang secara langsung dan mengurangi kesempatan munculnya ancaman apapun diberbagai belahan dunia melalui peningkatan kemampuan pertahanan, aliansi dan kerjasama internasional.

Dengan demikian kebijakan pertahanan Jepang berdasarkan NDPO 1996 berupa peningkatan kemampuan pertahanan Jepang sendiri sambil melakukan penguatan aliansi keamanan Jepang-AS dan mulai berkontribusi dalam kegiatan internasional dalam kerangka pengaturan keamanan Jepang-AS. Kebijakan tersebut mengalami pengembangan dalam NDPG tahun 2005, yaitu konsep strategi keamanan terintegrasi yang mengkombinasikan upaya Jepang secara

mandiri, pengaturan keamanan Jepang-AS dan kemampuan intelijen. Kebijakan lainnya adalah memanfaatkan teknologi canggih, mengefisienkan penggunaan SDM serta mengembangkan sistem pertahanan rudal balistik.

Dengan adanya kebijakan pengembangan sistem pertahanan rudal balistik (BMD) menunjukkan kecenderungan Jepang untuk kembali merevitalisasi dan mentransformasi pertahanan negaranya dari deterrence menjadi aktif. Dapat terlihat dari perubahan doktrin yang dilakukan oleh pemerintah Jepang yang dimuat dalam NDPO Tahun 1996 dan NDPG Tahun 2005. Pada NDPO Tahun 1996 dikatakan bahwa doktrin pertahanan Jepang adalah konsep kekuatan pertahanan standard dan menekankan pada deterrence, sementara itu pada NDPG 2005 dikatakan bahwa doktrin pertahanan Jepang bersifat multifungsi, fleksible dan efektif, menekankan pada respon.

Perubahan kebijakan yang diambil Jepang di bidang pertahanan merupakan bentuk politik adaptasi Jepang terhadap dinamika keamanan internasional yang terjadi dengan mempertimbangkan tuntutan yang muncul dari lingkungannya maupun dari internal negara.

1. 2 Kebijakan Sebagai Bentuk Adaptasi Jepang

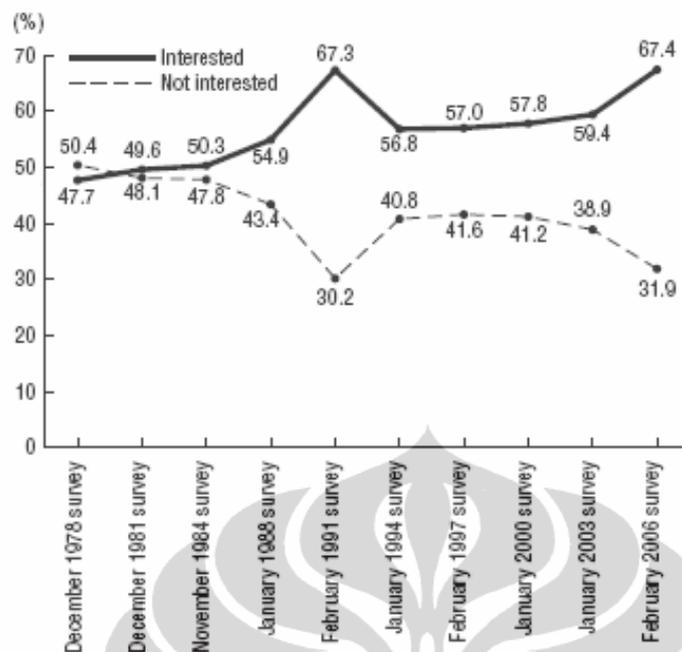
Kebijakan yang dimunculkan oleh pemerintah Jepang sebagai bentuk adaptasi yang dilakukan tidak terlepas dari pengaruh tuntutan yang datang dari dalam negar naupun dari luar negara. Pada masa setelah perang, Jepang sangat memperhatikan opini publik yang muncul di masyarakatnya dan polling opini menjadi rutinitas yang menonjol dalam negara Jepang. Polling mengenai isu-isu kebijakan publik, termasuk di dalamnya kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh kantor Perdana Menteri, Kantor Menteri Luar Negeri, organisasi pemerintah lain, dan media memberikan masukan pada para analis bahwa opini kolektif memberikan tekanan yang mempengaruhi para pengambil kebijakan. Tanggapan publik yang meningkat merefleksikan adanya peningkatan rasa bangga terhadap bangsa dan tanah air. Lebih dari itu, diskusi publik menyangkut masalah keamanan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemimpin partai politik, komentator pers, dan kaum akademisi tidak dianggap angin lalu dan

mendoktrinasi, lebih terbuka dan pragmatis, yang menunjukkan secara tidak langsung bahwa tanggapan publik terhadap masalah-masalah yang dibahas juga berkembang. Dengan kata lain, publik Jepang mulai cerdas menanggapi perubahan kebijakan yang terjadi dan memiliki visi sendiri tentang kebijakan yang dikehendaki diambil oleh negaranya untuk kepentingan mereka masing-masing.

Survey opini publik terhadap Pasukan Bela Diri (SDF) dan isu pertahanan diselenggarakan oleh Sekretaris Kabinet bidang informasi publik pada 16-26 Februari 2006. Jumlah sampel yang diambil adalah 3000 orang penduduk Jepang dengan rentang usia 20 tahun ke atas. Validitas responden 1.657 orang (55,2%). Survey dilakukan dengan menggunakan metode survey wawancara individual oleh personil survey. Seperti disampaikan sebelumnya, opini publik merupakan faktor penting bagi suatu negara dalam pengambilan kebijakannya. Survey terhadap opini publik dilakukan untuk melihat sejauh mana dukungan masyarakat Jepang terhadap kebijakan pertahanan yang telah diambil pemerintah. Selain itu dapat menjadi bahan masukan tentang kebijakan pertahanan yang selanjutnya diambil, karena dalam adaptasi tuntutan yang berasal dari internal negara turut menjadi faktor penting dalam kebijakan adaptasi yang dilakukan.

Peningkatan peran *Self Defence Force* setelah berakhirnya Perang Dingin merupakan indikasi perubahan kebijakan Jepang di bidang pertahanan. Pemerintah melakukan polling untuk melihat sejauh mana tanggapan masyarakat Jepang terhadap keberadaan SDF dan isu pertahanan dan juga dukungan mereka terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Hasil polling ditampilkan dalam bentuk grafik dan merupakan kompilasi dari hasil survey yang telah dilakukan selama rentang waktu sebelum dan setelah Perang Dingin terjadi.

Grafik 2. 1 Ketertarikan pada SDF dan Isu Pertahanan



Grafik 2. 1 Menunjukkan ketertarikan responden pada *Self Defence Force* dan isu pertahanan. Garis tebal menunjukkan ketertarikan, sementara yang lebih tipis menunjukkan ketidaktertarikan. Survey mengambil rentang waktu 1978-2006. Dari hasil survey tampak bahwa ketertarikan publik Jepang terhadap SDF dan isu pertahanan sangat tinggi pada masa pasca Perang Dingin. Pada survey Februari 1991 tingkat ketertarikan publik mencapai 67,3%. Hal itu terjadi karena perubahan dinamika keamanan pasca Perang Dingin. Kondisi yang tidak jelas tentang konstelasi politik dunia membuat rasa ketertarikan masyarakat terhadap masalah keamanan meningkat. Otomatis kecenderungan untuk mengamati perubahan yang terjadi dalam pasukan pertahanan juga meningkat karena publik tertarik untuk melihat tendensi perkembangan yang terjadi pada negara dan kondisi yang mungkin dialami oleh negara.

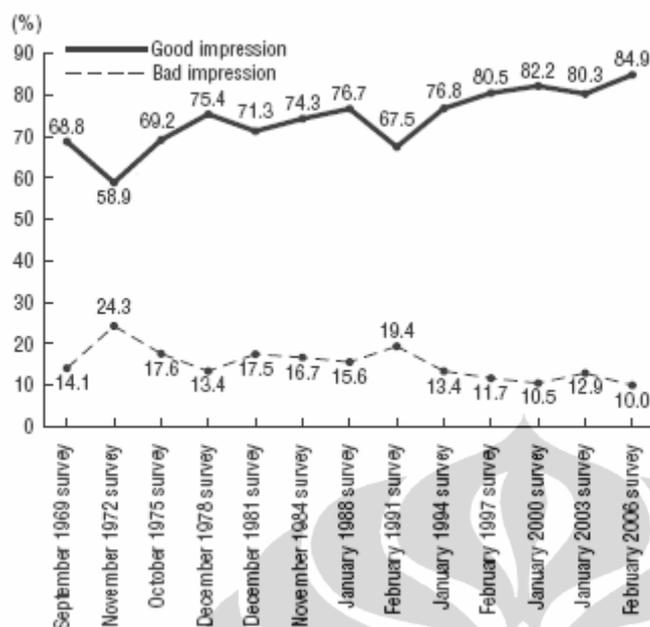
Pada perkembangan survey di tahun selanjutnya nilai ketertarikan publik berkenaan dengan masalah SDF dan isu pertahanan turun dari angka 67,3%. Di bulan Januari 1994 angka ketertarikan publik mencapai 56,8%, selanjutnya pada bulan Februari 1997 angka ketertarikan menunjukkan angka 41,6%. Disusul oleh survey pada bulan Januari 2000 dan bulan Januari 2003 masing-masing pada angka 57,8% dan 59,4%. Secara umum ketertarikan publik mengalami kenaikan yang mengindikasikan keinginan publik untuk turut serta dalam memberikan

masuk pada kebijakan yang dibuat negara dan juga sebagai alat publik untuk menyatakan pendapat dan kebutuhan mereka. Angka yang cenderung stabil pada survey disebabkan kebijakan pertahanan Jepang yang cenderung *deterrence* dan bergantung pada payung keamanan Amerika Serikat. Peningkatan terjadi bila muncul peristiwa yang berpotensi mengancam keamanan, terutama keamanan negara Jepang pada khususnya. Peningkatan perhatian Jepang terhadap SDF dan isu pertahanan kembali muncul di tahun 2006 yang ditunjukkan oleh angka survey pada Februari 2006 sebesar 67,4%. Kondisi itu merupakan implikasi terhadap kebijakan pertahanan yang dikeluarkan Jepang, salah satunya dengan adanya NDPG Tahun 2005 yang mulai merubah karakteristik pertahanan Jepang menjadi lebih aktif.

Ketertarikan publik terhadap SDF dan isu keamanan Jepang menjadi indikator yang positif bagi dinamika kebijakan pertahanan yang diambil oleh para pimpinan yang berwenang di Jepang dan dapat menjadi tolak ukur yang baik bagi mereka sepanjang berkenaan dengan aspirasi positif, dalam pengertian memberi masukan, pada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Selanjutnya kesan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap Self Defence Force (SDF) menjadi tolak ukur kinerja SDF selama rentang waktu sebelum dan sesudah Perang Dingin. Kecenderungan apakah SDF telah memenuhi harapan public Jepang ditunjukkan oleh hasil survey. Hasil tersebut dapat dilihat pada grafik 2.2 berikut :

Grafik 2. 2 Kesan Terhadap Self Defence Force (SDF)

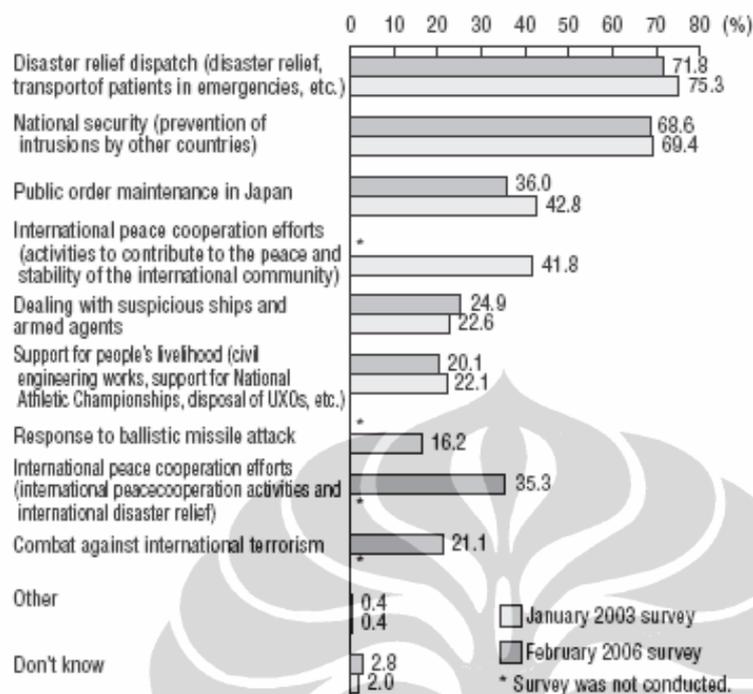


Signifikansi angka yang ditunjukkan oleh hasil survey tentang kesan yang diperoleh masyarakat Jepang terhadap Self Defence Force (SDF) dominan menunjukkan angka yang positif. Penurunan dukungan yang mencolok pada rentang setelah Perang Dingin tampak pada survey bulan Februari 1991 yang mencapai angka 67,5%. Keikutsertaan SDF dalam aliansi dengan Amerika dan membantu Amerika dengan kapal penyapu ranjau, walaupun dilakukan saat perang mereda membuat penolakan di kalangan masyarakat Jepang, karena secara tidak langsung hal tersebut menjadi indikator kembalinya Jepang dalam kancah perang. Kekhawatiran masyarakat adalah jika Jepang terjebak dalam pertempuran karena terbawa oleh kondisi yang ada di lapangan.

Survey menunjukkan angka tertinggi pada bulan Februari 2006, dengan angka 84,9%. Dengan demikian tampak bahwa masyarakat mendukung keberadaan *Self Defence Force* dalam Negara Jepang, meskipun di tahun tersebut *Self Defence Force* sudah tidak hanya menjalankan tugas sebagai penjaga keamanan Jepang saja. Namun mulai bertransformasi menjadi pasukan pertahanan aktif.

Berikut adalah grafik pengetahuan tentang peran dan aktivitas *Self Defence Force*

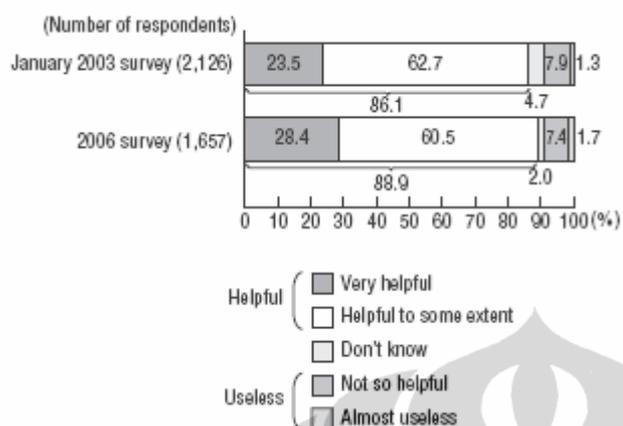
Grafik 2. 3 Berdasarkan alasan kenapa SDF dibentuk.



Bila melihat hasil survey, maka tampak bahwa nilai tertinggi ada pada alasan bantuan kemanusiaan. Menurut publik Jepang kehadiran *Self Defence Force* penting sebagai bentuk bantuan pada bencana atau lebih pada fungsi pasukan keamanan. Akan tetapi untuk alasan keamanan nasional (mencegah intrusi negara lain ke Jepang) juga memiliki angka tinggi yaitu 69,4% pada survey bulan Januari 2003 dan 68,6% pada survey bulan Februari 2004. Dominan pilihan yang diberikan yang menyangkut masalah keamanan mendapat respon cukup positif dari publik. Sebagai contoh SDF sebagai pasukan perdamaian (kontribusi Jepang terhadap perdamaian dan stabilitas masyarakat internasional) mencapai angka 41,8% pada survey bulan Januari 2003. Pembentukan SDF sebagai respon terhadap serangan missil balistik 16,2% dan sebagai pasukan perdamaian (untuk bantuan kemanusiaan) mencapai 35,3%, sementara itu untuk serangan terhadap teroris internasional mencapai 21,1%.

Melihat hasil survey, maka tampak bahwa dukungan terbesar dari masyarakat Jepang terhadap kehadiran *Self Defence Force* adalah sebagai penjaga keamanan nasional Jepang.

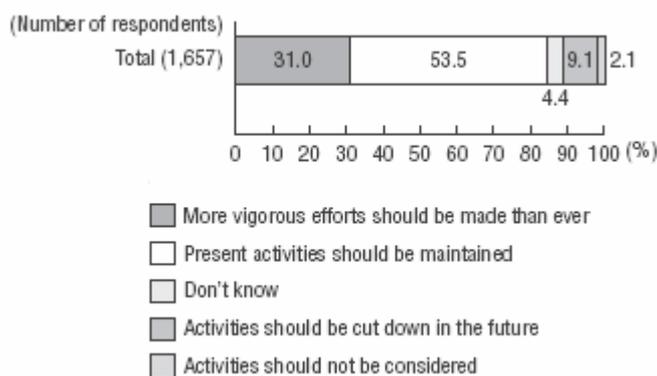
Grafik 2.4 Tanggapan Tentang Aktivitas Bantuan Kemanusiaan SDF



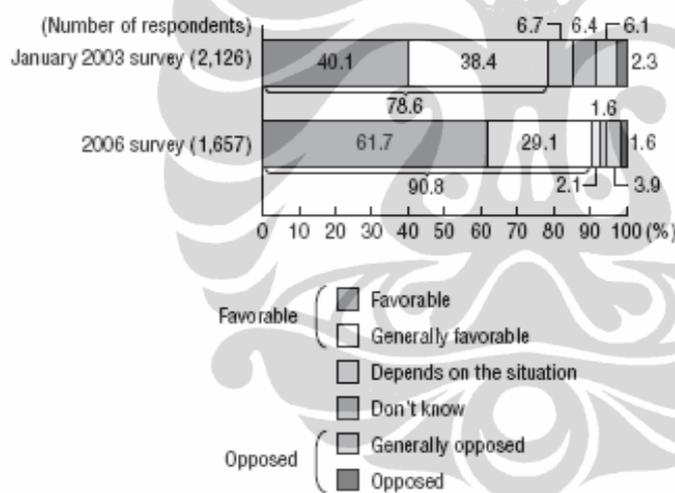
Kemudian survey tentang tanggapan terhadap bantuan kemanusiaan yang dilakukan SDF dominan responden memberikan respon positif dan menyatakan bahwa hal tersebut sangat berguna. Pada survey tahun 2003 dengan jumlah responden 2.126 orang, 23,5% diantaranya menyatakan bantuan tersebut sangat membantu, sementara 62,7% menyatakan membantu pada batas tertentu. Survey pada tahun 2006 dengan 1.657 orang responden memberikan hasil yang tidak jauh berbeda, yaitu 28,4% menyatakan membantu, sementara 60,5% menyatakan membantu dalam batas tertentu. Walaupun demikian, terdapat responden yang menyatakan bantuan kemanusiaan yang dilakukan Jepang nyaris tidak berguna, yaitu 1,3% pada survey tahun 2003 dan 1,7% di tahun 2006.

Hasil survey lain yang berkaitan dengan bantuan kemanusiaan dapat dilihat dari grafik di bawah ini.

Grafik 2.5 Perlu/tidak diteruskannya Operasi Bantuan Kemanusiaan



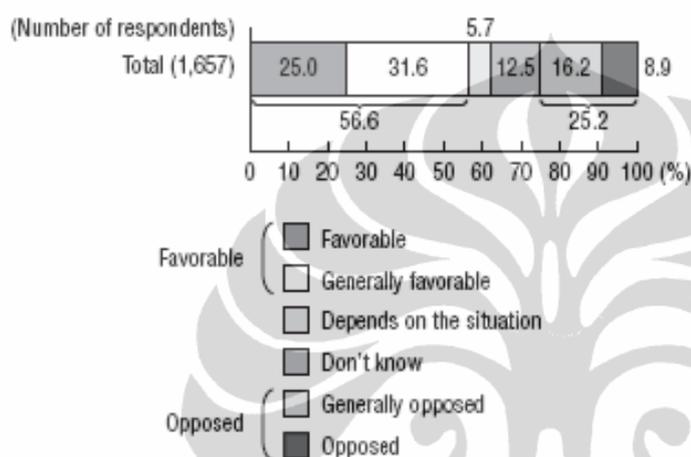
Grafik 2.6 Opini Tentang Kegiatan Kemanusiaan Bagi Negara Yang Terkena Musibah



Survey tentang opini terhadap kegiatan kemanusiaan yang dilakukan SDF bagi negara yang terkena dominan responden memberikan respon positif dan menyatakan bahwa hal tersebut sangat berguna. Pada survey tahun 2003 dengan jumlah responden 2.126 orang, 40,1% diantaranya menyatakan bantuan tersebut sangat mendukung, sementara 38,4% menyatakan cukup mendukung. Survey pada tahun 2006 dengan 1.657 orang responden memberikan hasil yang jauh meningkat, yaitu 61,7% menyatakan mendukung, sementara 29,1% menyatakan cukup mendukung. Ada yang menyatakan tergantung pada situasi yang ada. Untuk survey tahun 2003 mencapai angka 6,7% dan di tahun 2006 sebesar 2,1%.

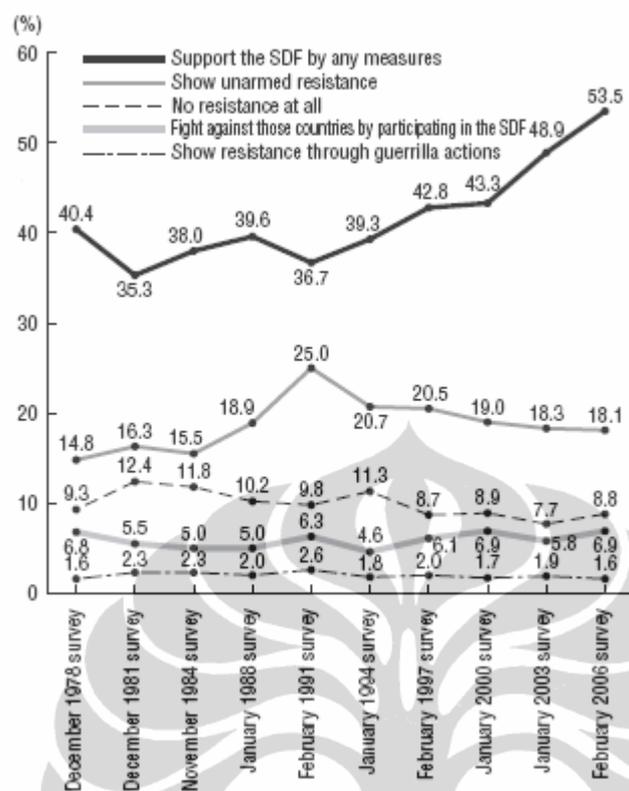
Terdapat pula responden yang menyatakan tidak setuju dengan kegiatan kemanusiaan yang dilakukan Jepang, yaitu sebesar 8,4% pada survey tahun 2003 dan 5,5% di tahun 2006.

Grafik 2.7. Opini Tentang Pengembangan Sistem Pertahanan Rudal Balistik (Ballistic Missile Defence/BMD)



Opini terhadap pengembangan system pada survey dengan jumlah responden 1.657 orang, 56,6% diantaranya menyatakan mendukung, sementara 5,7% menyatakan tergantung pada situasi yang ada. Terdapat pula responden yang menyatakan tidak setuju dengan pengembangan system balistik tersebut dan jumlahnya mencapai 25,2%. Dari hasil tersebut terlihat bahwa publik Jepang masih belum sepenuhnya menerima perubahan kebijakan Jepang yang terlihat aktif, namun disisi lain dukungan terhadap kebijakan tersebut pun di dapat oleh pemerintah, sehingga dengan mengamati hasil jajak pendapat dapat diambil kesimpulan bahwa politik adaptasi Jepang di bidang pertahanannya memiliki hasil yang positif.

Grafik 2. 8 Tanggapan Terhadap Intrusi Negara Lain

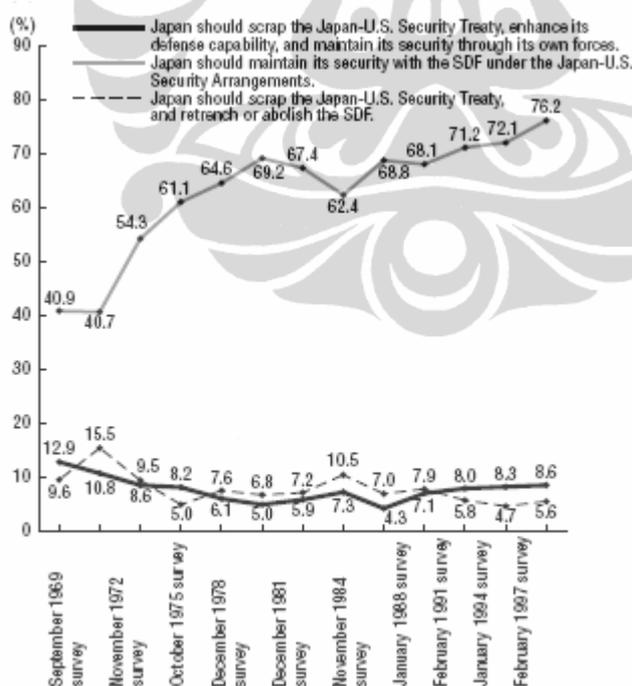


Grafik 2. 8 Menunjukkan tanggapan responden terhadap intrusi negara lain ke Jepang. Survey akan memberi hasil pilihan yang dilakukan publik jika ada ancaman intrusi negara lain ke Jepang. Garis tebal berwarna hitam menunjukkan dukungan penuh terhadap SDF. Garis yang lebih tipis berwarna abu-abu menandai sikap menunjukkan pertahanan tanpa senjata. Garis putus-putus menandai tidak memberikan perlawanan sama sekali. Garis abu-abu tebal menandai ikut melakukan perlawanan terhadap negara yang melakukan intrusi dengan cara bergabung dengan SDF. Sementara, garis dan titik menandai perlawanan dengan cara gerilya. Survey mengambil rentang waktu 1978-2006. Dari hasil survey tampak bahwa dukungan tertinggi diberikan pada tindakan yang dilakukan sepenuhnya oleh SDF. Rakyat Jepang mempercayakan penjagaan sepenuhnya pada pasukan pertahanannya. Pada survey Februari 1991 dukungan terhadap ‘gerakan militer’ SDF mencapai 36,7%. Publik Jepang masih belum tertarik untuk memanfaatkan SDF sebagai tentara yang sesungguhnya. Hal itu terjadi karena perubahan dinamika keamanan pasca Perang Dingin. Kondisi yang tidak jelas tentang konstelasi politik

Pada perkembangan survey di tahun selanjutnya nilai dukungan publik berkenaan dengan intrusi negara lain ke Jepang naik menjadi 39,3%. Selanjutnya pada bulan Februari 1997 angka menunjukkan angka 42,8%. Disusul oleh survey pada bulan Januari 2000 dan bulan Januari 2003 masing-masing pada angka 43,3% dan 48,9%. Secara umum ketertarikan publik mengalami kenaikan yang mengindikasikan dukungan publik kepada penjagaan keamanan oleh SDF jika terjadi intrusi negara lain ke Jepang.

Peningkatan dukungan publik berkenaan dengan intrusi negara lain ke Jepang tahun 2006 ditunjukkan oleh angka survey pada Februari 2006 sebesar 53,5%. Secara eksplisit bila mengamati grafik tersebut rakyat Jepang akan mendukung bila SDF menggunakan senjata bila ada intrusi negara lain ke Jepang yang merupakan kontra indikasi bila rakyat menginginkan SDF hanya sebagai pasukan bela diri. Dengan demikian tampak bahwa pengembangan pertahanan menjadi hal yang tidak tabu lagi bagi rakyat Jepang.

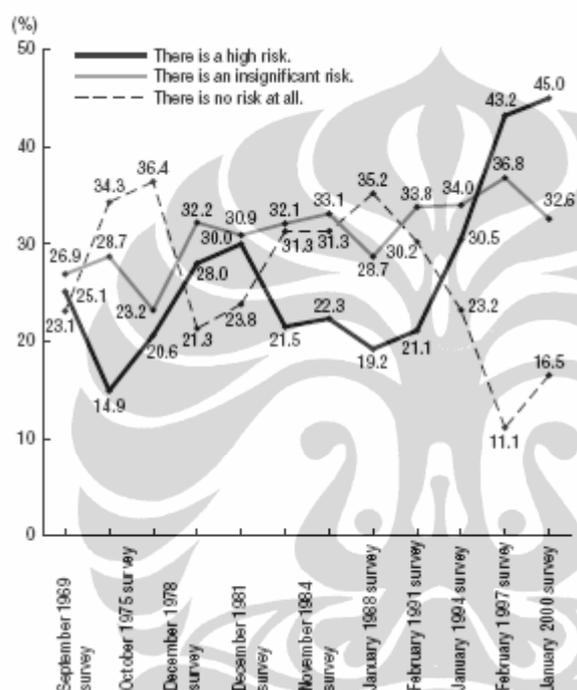
Grafik 2.9 Alat Untuk Menjaga Keamanan Jepang



Dari survey yang dilakukan dan data yang diperoleh untuk periode pasca perang dingin adalah kecenderungan publik Jepang untuk memilih bentuk

pertahanan aliansi dengan Amerika. SDF harus menjaga sendiri keamanan dengan kemampuan yang dimilikinya, namun tetap dalam kerangka kerjasama dengan Amerika Serikat.

Grafik 2.10 Resiko Jepang Terlibat Dalam Perang



Dengan melihat hasil survey periode waktu setelah perang dingin, maka publik Jepang memperkirakan bahwa resiko Jepang terlibat dalam perang sangat besar. Pada survey bulan Desember 1991 responden yang memiliki opini tersebut sebesar 21,1% dan maningkat tajam pada survey bulan Januari 1994 sebesar 30,5%. Pada survey bulan February 1997 angkanya mencapai 43,2% dan terus meningkat pada survey di bulan Januari 2000 sebesar 45,0%.

Kekalahan koalisi partai politik yang dipimpin LDP dari Partai Demokrat Jepang (Democratic Party of Japan/DPJ) di pemilihan majelis tinggi Jepang pada tanggal 29 Juli telah menyebabkan gelombang kejut pada persekutuan Jepang-AS. Pimpinan DPJ, Ozawa Ichiro dengan segera membawa DPJ ke arah yang bertentangan dengan Amerika Serikat menjadikan Jepang sebagai partner militer globalnya.

Pihak oposisi (DPJ) memanfaatkan dominasi yang baru dimenangkannya di parlemen (tepatnya di Majelis Pertimbangan) dalam empat langkah. Pertama, DPJ dan partner koalisinya di Majelis Pertimbangan dengan segera menunjuk seorang tokoh senior dari kubu Sosial Demokrat, Eda Satsuki, sebagai Presiden Majelis Tinggi. Satsuki menjadi ketua Majelis Pertimbangan pertama yang bukan berasal dari kubu LDP dalam setengah abad terakhir. Penunjukan ini memungkinkan DPJ untuk pertama kalinya mengendalikan rapat-rapat yang berlangsung dalam Majelis Tinggi. Langkah yang kedua adalah dengan menegaskan pada LDP bahwa pemerintah perlu mendapatkan persetujuan parlemen untuk pengiriman pasukan ke luar negeri, bukan hanya sekedar pemberitahuan dan pengiriman laporan saja. Langkah ketiga adalah dengan mengumumkan bahwa DPJ menolak segala upaya penambahan/pengembangan kekuatan Angkatan Udara yang sudah dikirimkan ke Irak, dan bahwa DPJ pernah mempertimbangkan untuk mendorong ditetapkannya Ketetapan Majelis Tinggi yang mengakhiri pengiriman tersebut. Langkah keempat adalah mengumumkan pada LDP dan Amerika Serikat, bahwa DPJ menolak segala upaya pengembangan/penambahan kekuatan Angkatan Laut yang ditugaskan di Samudra Hindia, setelah berakhirnya masa tugas mereka yang didasarkan pada ketentuan Parlemen tanggal 1 November 2001 tentang Hukum Tindakan-tindakan Anti Terorisme.

Tidak mengejutkan bahwa kritik paling keras terhadap Ozawa dan posisi politiknya datang dari Duta Besar AS di Tokyo, Thomas Schieffer. Baik Ozawa dan Schieffer memiliki reputasi sebagai politikus yang intimidatif. Saat Schieffer menerima laporan bahwa DJP hendak menolak perpanjangan penugasan keempat angkatan laut Jepang (MSDF) di Samudra Hindia, dia langsung dengan tegas menuntut agar DPJ merubah posisinya tersebut. Schieffer menjadi Duta Besar di Jepang setelah menjadi Duta Besar di Australia, dimana dia mendapatkan reputasi sebagai seorang Duta Besar yang melakukan intervensi terlalu jauh terhadap politik domestik Australia. Setelah pengumuman Ozawa bahwa DPJ hendak menolak perpanjangan penugasan MSDF, Shieffer mengadakan pertemuan langsung dengan Ozawa. Dalam pertemuan tersebut dia mengatakan bahwa isu Afganishtan adalah isu yang 'berada di atas pertikaian politik domestik'. Schieffer

kemudian menegaskan bahwa pandangan Ozawa bahwa keterlibatan AS di Afganistan adalah perang yang dilakukan tanpa dukungan PBB adalah pandangan yang salah. Menurut Schieffer, keterlibatan AS di Afganistan didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1746 (2008). Efek yang langsung terlihat dari serangan publik Schieffer terhadap pimpinan oposisi di Jepang, tidak hanya menyebabkan Ozawa semakin bertekad untuk menolak penugasan MSDF di Samudra Hindia, tapi memperluasnya hingga ke penolakan untuk berpartisipasi dalam keseluruhan operasi-operasi militer global Amerika Serikat.

“Menurut interpretasi kami terhadap konstitusi, hak membela diri sendiri berlaku ketika Jepang diserang,” demikian Ozawa pada pertemuan terbuka dengan Schieffer di Tokyo. “Jika saya berada dalam posisi pengambil keputusan, saya pikir kami tidak akan berpartisipasi dalam operasi-operasi militer yang dipimpin oleh Amerika Serikat.”

Koran Nikkei kemudian mencatat bahwa Sang Duta Besar, tampaknya sedikit terganggu dengan pernyataan Ozawa bahwa Presiden AS, George W. Bush, telah melancarkan ‘Perang Amerika’ di Afganistan tanpa menunggu konsensus internasional terlebih dahulu, mengingatkan sang pemimpin oposisi bahwa “sembilan puluh persen minyak yang digunakan oleh Jepang berasal dari kawasan Timur Tengah yang berada di bawah pengaruh teroris, dan juga ada warga negara-warga negara Jepang yang tewas dalam serangan 11 September 2001”.

Dua hari setelah pertemuan tersebut, dalam pertemuan lain dengan Menteri Luar Negeri, Aso, penilaian Schieffer tentang kemungkinan konsekuensi terburuk atas tindakan tak bertanggung jawab Ozawa semakin meningkat. Saat itu dia telah menganggap bahwa mempertahankan koalisi Samudra India sebagai suatu hal yang sangat penting bagi keamanan seluruh dunia, bukan hanya keamanan Amerika Serikat dan Jepang.

Dalam pertemuannya dengan Schieffer yang diliput oleh press, Ozawa (sang nasionalis yang agresif) mengemukakan pandangan yang mewakili banyak kaum konservatif LDP yang sekarang tersingkir. Ozawa menekankan bahwa perang di Afganistan adalah perang untuk melindungi kepentingan Amerika

yang dimulai oleh Amerika Serikat tanpa persetujuan PBB. Jepang, menurut Ozawa, harus terus berpartisipasi dalam operasi perdamaian PBB, tapi tidak boleh ikut terlibat dalam perang Amerika.

Dengan memperhatikan hubungan ketergantungan yang bersifat psikologis antara Amerika Serikat dengan sekutunya, seperti Jepang dan Australia, satu media mengkritik tindakan Ozawa yang menolak untuk memenuhi tuntutan AS akan berisiko membuat Jepang 'terisolasi'. Tulisan editorial Nikkei mengkhawatirkan bahwa perkembangan ini dapat merusak hubungan persekutuan antara Jepang dengan AS. Risiko ini dapat dihindari hanya dengan memanggul 'tanggung jawab internasional yang lebih besar', demikian pendapat seorang pejabat senior MSDF kepada Yomiuri: "Saya percaya bahwa misi (yang sedang kami emban) ini adalah sebuah paspor untuk (dapat diterima) di masyarakat internasional yang masih terus melancarkan perang melawan terorisme." Lebih penting lagi, kekalahan LDP dalam pemilihan umum parlemen dan serangan tingkat tinggi Ozawa terhadap penugasan MSDF di Samudra India telah menjadi pukulan telak bagi upaya AS untuk mendorong LDP mengirimkan pasukan darat dan udara ke Afganistan. Paling tidak selama tahun lalu, Amerika Serikat dan NATO telah menyerukan pentingnya peningkatan komitmen militer Jepang di Afganistan. AS dan negara-negara anggota NATO garis keras lainnya juga lebih keras menyerukan kepada anggota-anggota NATO lainnya untuk mengirimkan lebih banyak pasukan ke perang Afganistan dengan alasan mereka semakin lama semakin terdesak. Karena Jepang, dan juga Australia, tidak terlalu banyak mendapatkan pembatasan untuk terjun dalam perang, NATO dan AS menganggap mereka sebagai negara kunci untuk 'partner non-NATO' dan PM ABE telah mengindikasikan bahwa kerjasama yang lebih erat dengan NATO di Afganistan adalah salah satu tujuannya. Wakil Presiden Afganistan mengunjungi Tokyo pada bulan Juni lalu dan menyerukan agar Jepang memberikan lebih banyak bantuan, termasuk peningkatan peran LDP. Pada saat yang bersamaan, seorang pejabat senior Departemen Pertahanan AS mendesak agar LDP menurunkan lebih banyak pasukan darat ke Afganistan.

Dengan demikian, institusi pertahanan dan keamanan Jepang, Duta Besar AS untuk Jepang, dan media-media besar, semuanya menyerang Ozawa dengan

mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan ancaman terhadap solidaritas koalisi internasional di Afganistan, yang juga merupakan bagian dari ‘perang melawan teror’. Seorang pejabat senior Kementerian Pertahanan Jepang mengatakan kepada Yomiuri: “Afganistan adalah tempat pertemuan berbagai kelompok teroris internasional. Jika upaya untuk membangun kembali negara tersebut gagal, dunia akan terus menerus dicengkeram ketakutan oleh ancaman terorisme.” Koran Nikkei ikut menyerang DJP: “penolakan Diet untuk memperpanjang (penugasan itu) hanya akan menimbulkan pertanyaan tentang komitmen Jepang dalam perang melawan terorisme.” Pada saat yang bersamaan dengan perdebatan tentang kemungkinan AS akan menginvasi Waziristan, Thomas Schieffer menceramahi Ozawa pada pertemuan mereka tentang konsekuensi penarikan MSDF dari samudra Hindia pada saat Pakistan sedang mendapatkan giliran menjadi pemimpin pasukan koalisi, bahwa penarikan MSDF mungkin akan melemahkan komitmen Pakistan untuk tetap menjadi anggota koalisi.

Bahwa akhirnya Ozawa Ichiro yang kemudian memimpin penentangan terhadap upaya AS untuk menentukan arah kebijakan keamanan Jepang mungkin mengejutkan banyak orang. Hal ini mungkin dampak dari Ozawa yang mengkampanyekan slogan sayap kanan yang nasionalis, yaitu menjadikan Jepang sebagai “sebuah negara normal”. Proses remilitarisasi yang sedang dijalani Jepang adalah cerita sukses dari kampanye tersebut: meninggalkan konsep ‘*defensive defense*’ dan menggantinya dengan kebijakan kesiapan militer untuk mengatasi ancaman yang mungkin datang, normalisasi penugasan luar negeri SDF, dan pergerakan menuju paradigma ‘*great power realism*’ serta integrasi yang lebih erat dengan Kebijakan Militer Global AS.

Salah satu agenda kaum nasionalis adalah mengembalikan kedaulatan Jepang secara penuh: oleh karena itu, sebenarnya, tidaklah mengejutkan Ozawa mengeluarkan kritikan tajam terhadap politik unilateral AS dan pemahamannya bahwa Jepang akan secara otomatis mengikuti AS. Ozawa tidak menolak kemungkinan berkolaborasi dengan AS dalam melawan terorisme, namun kolaborasi itu harus berbentuk sebagai “keterikatan antara yang sederajat” sebuah istilah yang hanya dapat diterapkan pada hubungan persekutuan Ampo, pada masa

manapun dari sejarahnya yang setengah abad itu.

Namun, mungkin dampak yang lebih penting dalam jangka panjang bagi demokrasi dan terhadap kemungkinan Jepang mengambil peranan penting dalam politik global “sebagai sebuah negara normal” (baik dengan militerisasi atau tidak, baik sebagai sekutu AS atau tidak) adalah tuntutan Ozawa agar setiap perwakilan yang terpilih, baik sebagai anggota parlemen atau sebagai menteri, harus mengambil tanggung jawab sepenuhnya dan sepantasnya untuk keputusan-keputusan yang mereka buat. Sudah terlalu lama, kata Ozawa, politisi Jepang selalu memilih pejabat senior tak terpilih untuk menjalankan kekuasaan sementara politisi terpilih hanya mengamati saja, dengan demikian memberikan legitimasi namun tidak mengambil tanggung jawab. Politik luar negeri dan kebijakan keamanan adalah contoh utama hal itu, dan kemenangan DJP di Majelis Tinggi yang langsung dimanfaatkan Ozawa adalah satu contoh kasus dimana Ozawa mempraktekkan apa yang sudah dia tuntut dari dulu.

Hasilnya sudah langsung terlihat. Serangan Ozawa terhadap kebijakan Timur Tengah dengan menggunakan istilah ‘bisnis sekutu seperti biasanya’ pasti memiliki sejumlah motif tertentu, dan mungkin saja tidak akan bertahan lama. Namun, untuk pertama kalinya dia telah membawa kelompok oposisi di parlemen pada posisi untuk meminta pertanggung jawaban pemerintah, dan memaksa AS untuk muncul ke luar dan melakukan intervensi publik langsung. Terakhir, tindakan itu juga memunculkan kekhawatiran pada AS akan kontribusi militer Jepang untuk perang di Afganishta.¹⁹

¹⁹ Dipo Siahaan. *Akhir persekutuan Jepang-Amerika? Penolakan Ozawa Atas Kebijakan Pengiriman Pasukan Jepang ke Samudra Hindia*, Terjemah dari tulisan Prof. Richards Tanter. Diakses dari <http://jepangindonesia.wordpress.com/tag/politics-security/>

BAB III
POSTUR PERTAHANAN JEPANG DAN PERKEMBANGAN
TEKNOLOGI PERTAHANAN JEPANG
PASCA PERANG DINGIN (1990-2007)

3.1 Postur Pertahanan Jepang

Postur pertahanan terdiri dari strategi dan doktrin pertahanan, organisasi pertahanan, kapabilitas pertahanan, gelar kekuatan pertahanan, dan anggaran pertahanan. Postur pertahanan merupakan gambaran tentang kekuatan pertahanan yang mencakup kemampuan, kekuatan, gelar kekuatan, serta sumber-sumber daya nasional.¹ Secara universal, postur pertahanan hampir semua negara dirancang untuk dapat melakukan fungsi penangkalan atau daya tangkal dan mampu melaksanakan peperangan. Oleh karena itu, postur pertahanan dirancang atas dasar pertahanan eksternal yang dirumuskan dalam penerapan strategi pertahanan tertentu.

1.1.1 Strategi dan Doktrin Pertahanan

Pasca Perang Dingin Jepang melakukan perubahan strategi pertahanannya. Puncaknya adalah saat dibentuknya Departemen Pertahanan sebagai peningkatan status Badan Pertahanan Jepang pada 9 Januari 2007. Sepanjang sejarah berkembang isu, terutama berkisar pada posisi dan peran Jepang dalam memelihara stabilitas keamanan Asia Pasifik.

Perubahan berawal dari pengumuman Pemerintah Jepang 9 Desember 2004 tentang NDPO. Garis besar strategi Jepang di bidang pertahanan memetakan kebijakan pertahanan Jepang 10 tahun kemuka yang menitikberatkan program pembangunan sarana pertahanan jangka menengah, peremajaan alat utama system pertahanan, dan rencana formasi struktur pasukan pertahanan

Fokus utama strategi pertahanan Jepang yang baru adalah seperti kemungkinan serangan senjata balistik Korea Utara, China, dan terorisme

¹ Edy Prasetyono, *Postur Pertahanan : Kekuatan Pokok Minimum (MEF, Minimum Esensial Force)?*, Talking Point diperoleh dari browsing tanggal 30 Maret 2008.

internasional. Strategi berikut merujuk cakupan dan sikap baru tanggung jawab pertahanan Jepang. Strategi Jepang yang baru memuat kebijakan untuk mempertahankan tanah air dan bekerjasama untuk memelihara perdamaian internasional.

Orientasi kekuatan pertahanan Jepang mengalami perubahan, dari semula bersifat *deterrent effect-oriented* menjadi *response capability-oriented*. Dengan kata lain, Jepang akan ikut berperan aktif dalam berbagai aktivitas pemeliharaan perdamaian internasional, namun dokumen ini tegas menyatakan aliansi Jepang dan AS tidak terpisahkan.

Sebagai bagian integral modernisasi pertahanannya, Jepang akan menyederhanakan struktur kekuatan pertahanan menjadi kekuatan yang multifungsi, fleksibel, dan efektif, serta siap menghadapi ancaman senjata nuklir, kimia, dan biologi.

Memperhatikan perubahan strategis militer Jepang, terdapat tiga poin yang perlu diperhatikan:²

- a. Pertahanan baru merupakan keinginan kuat Jepang untuk mendapat pengakuan internasional. Jepang ingin dipandang sebagai kekuatan ekonomi sekaligus military dunia. Revisi pasal 9 Konstitusi Jepang menunjukkan keinginan Jepang menjadi 'negara normal'
- b. Perubahan ini juga menunjukkan keinginan Jepang 'menjaga jarak' dengan Amerika Serikat dalam aspek pertahanan dan keinginan untuk terlibat lebih aktif dalam kerjasama keamanan di kawasan Asia Pasifik.
- c. Perubahan strategi secara jelas menunjukkan revitalitas dengan China yang sedang berada pada titik terendah sejak Perang Dingin berakhir. Hal ini karena Cina khawatir akan kembalinya kekuatan militer Jepang di Asia Timur.

Perubahan fundamental dalam orientasi kebijakan pertahanan Jepang, menimbulkan kontroversi di kawasan Asia Timur. Di satu sisi, perubahan ini

² Anak Agung Banyu Perwita. Sosok Baru Pertahanan Jepang. Diakses dari <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0705/23/ln/3551618.htm>

adalah hak prerogatif Jepang dalam melindungi dan mencapai kepentingan keamanan nasionalnya, di sisi lain menimbulkan kecurigaan negara-negara tetangga, khususnya di Asia Timur dan Asia Tenggara. Penyebab kecurigaan, sikap ekspansionis militer Jepang pada Perang Dunia dan aneka kecenderungan memburuknya lingkungan keamanan di kawasan. Tingkat transparansi yang ditunjukkan Jepang dalam kebijakan pertahanan dan kemauan politiknya dalam melibatkan diri secara multilateral dalam berbagai isu keamanan kawasan bisa menjadi elemen penting untuk mengurangi tingkat kecurigaan dan persepsi ancaman negara-negara tetangga atas perubahan kebijakan pertahanan Jepang.

1.1.2 Organisasi Pertahanan

Perubahan fundamental dari organisasi Pertahanan Jepang adalah perubahan dari Badan Pertahanan Jepang menjadi Departemen Pertahanan pada 9 Januari 2007.

Sebagaimana diatur dalam Konstitusi 1947 yang isinya ditentukan oleh Amerika Serikat melarang Jepang memiliki kekuatan militer sendiri dan hanya diperbolehkan memiliki pasukan bela diri guna mempertahankan negara dari serangan musuh. Pasukan Jepang juga tidak boleh terlibat dalam sengketa internasional. Untuk mengurus pertahanannya, ditahun 1954 Jepang mendirikan Badan Pertahanan Jepang yang berada di bawah kantor kabinet. Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe ia memprioritaskan perubahan dan berupaya meningkatkan status Badan Pertahanan menjadi sebuah kementerian penuh.

Pada Desember 2006, parlemen Jepang menyetujui dan tidak ada penentangan berarti. Bahkan partai-partai oposisi mendukungnya. Pada 9 Januari 2007, Badan Pertahanan Jepang secara resmi menjadi Departemen Pertahanan yang memiliki kekuatan yang lebih besar karena berhak merencanakan anggaran sendiri dan mengajukan rancangan undang-undang. Departemen Pertahanan juga memiliki wewenang yang lebih luas dibanding Badan Pertahanan karena dapat menentukan kebijakan keamanan dan pertahanan Jepang.

Peningkatan status Badan Pertahanan mencerminkan adanya keinginan Jepang untuk memainkan peran yang lebih besar dalam mengatasi ancaman di kawasan. Dengan terbentuknya Departemen Pertahanan maka rencana pengembangan, anggaran militer dan struktur komando dalam hal *chain of command* dapat dilakukan dengan wewenang penuh oleh Departemen Pertahanan.

Hal yang menjadi indikator dalam transformasi untuk organisasi yaitu adanya perubahan pada struktur dan rantai komando. Perampingan struktur dan pemendekan rantai komando adalah hal yang menjadi ciri khas dari transformasi pertahanan dalam hal organisasi.

Self Defence Force sejak Maret 2006 bersatu di bawah satu komando. Dengan tantangan-tantangan baru yang disebabkan oleh ancaman baru yang muncul semacam terorisme dan rudal balistik, maka Jepang harus mengubah kemampuan pertahanannya dan menghadapi situasi tersebut secara efisien. Hal tersebut merupakan pernyataan dari Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi.³

Perubahan terbesar yang dilakukan adalah perombakan struktur militer. Angkatan darat, udara, dan laut yang sebelumnya memiliki rantai komando yang terpisah, kini berada di tangan satu komando. Jenderal Hajime Massaki diangkat menjadi Kepala Staf Gabungan Pasukan Bela Diri (SDF) Jepang. Di bawah sistem baru tersebut, kepala staf ketiga angkatan akan bertanggung jawab langsung kepada komandan pertahanan, sehingga sang komandan dapat bergerak efisien dalam tempo yang lebih singkat. Namun prinsip utama Jepang bahwa militer dikendalikan sipil tetap tidak berubah.

Komando tunggal ini dinilai perlu karena struktur lama sering mengakibatkan tak efisiennya gerak pasukan bila keadaan menuntut kerjasama lintas angkatan. Misalnya pada saat terjadi gempa alam besar di Kobe pada 18 Januari 1995, angkatan laut tidak diberitahu bahwa angkatan udara dan angkatan darat memiliki landasan helikopter di wilayah itu. Angkatan laut terpaksa mengirim suplai bantuan lewat darat yang mengakibatkan tertundanya bantuan kepada korban.

³ *Satu Komando di Negeri Sakura*, Koran Tempo, 29 Maret 2006.

Ketiga angkatan juga memakai istilah dan kode yang berbeda dan peta dengan skala yang berbeda. Hal itu disorot sebagai penyebab *Self Defence Force* sulit berkomunikasi.

Perombakan besar-besaran yang dilakukan merupakan kelanjutan dari penetapan Panduan Program Pertahanan Nasional yang ditetapkan pada Desember 2004 sebagai tanggapan terhadap peristiwa serangan teroris ke Amerika pada 11 September 2001. Panduan ini menetapkan strategi pertahanan Jepang masa depan yang meliputi kerjasama pertahanan dengan sekutu dan masyarakat internasional, serta efisiensi sistem pertahanan. Penggabungan yang dilakukan berhubungan sangat erat dengan politik.⁴

Struktur organisasi SDF Jepang tampak pada bagan 3.1 dan bagan 3.2. berikut. Perbandingan antara struktur SDF Jepang masa sebelum perubahan Badan Pertahanan Menjadi Departemen Pertahanan antara lain : perubahan pucuk pimpinan yang tadinya dipegang oleh kementerian pertahanan dan direktur jenderal badan pertahanan dialihkan pada menteri pertahanan. Pada Angkatan Darat terjadi perubahan struktur, yaitu penambahan *Central Readiness Force* yang terdiri dari brigade airborne, brigade helikopter, dan kelompok operator khusus. Selain itu terdapat penambahan brigade sinyal, *ground research&development command*, *ground material control command*, serta unit dan organisasi lain.

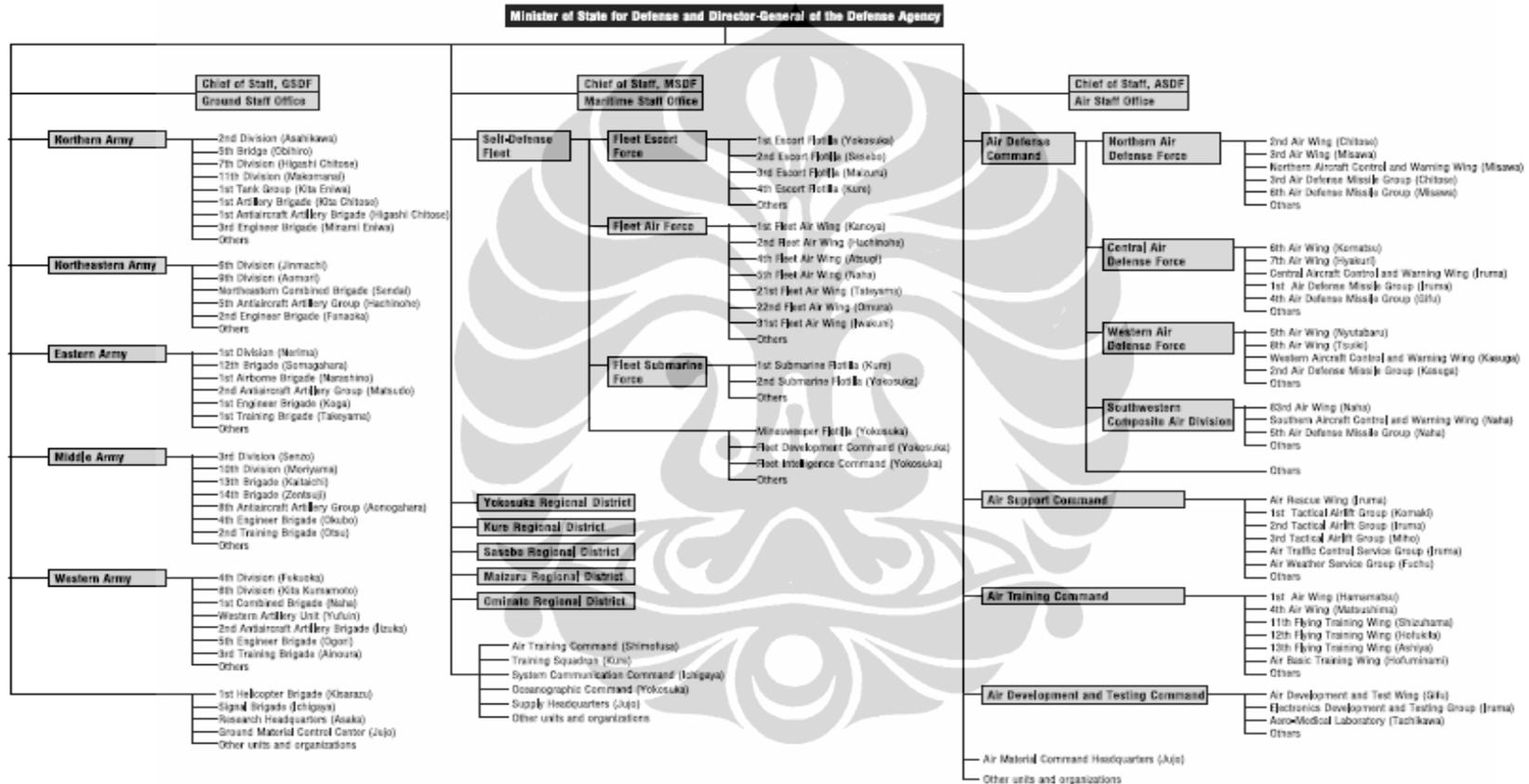
Pada Angkatan Laut secara umum struktur organisasinya hampir sama, perbedaan ada pada unit *oceanographics command* dan headquarters yang digantikan oleh *MSDF Maritime Material Command*.

Sementara pada Angkatan Udara tidak terjadi perubahan pada struktur organisasinya. Perubahan lebih ditujukan pada peningkatan kapabilitas pertahanannya terutama dari sisi teknologinya.

Perampingan struktur organisasi dan efisiensi rantai komando merupakan bentuk transformasi yang dilakukan Jepang.

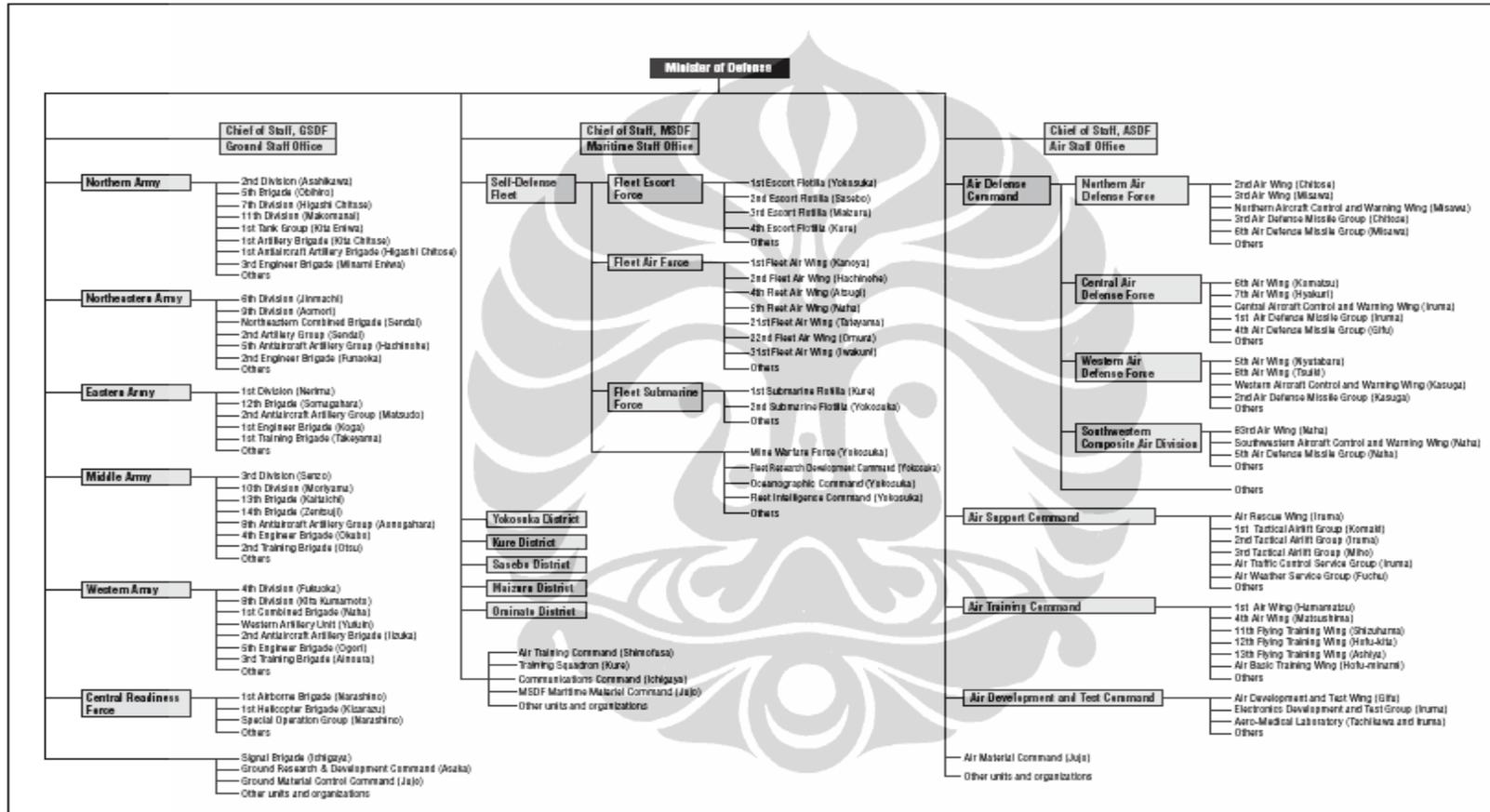
⁴ *ibid*

Bagan 3.1 Struktur Organisasi Departemen Pertahanan Jepang 2005



Sumber : Buku Putih Pertahanan Jepang 2005

Bagan 3.2 Struktur Organisasi Departemen Pertahanan Jepang 2007



Sumber : Buku Putih Pertahanan Jepang 2007

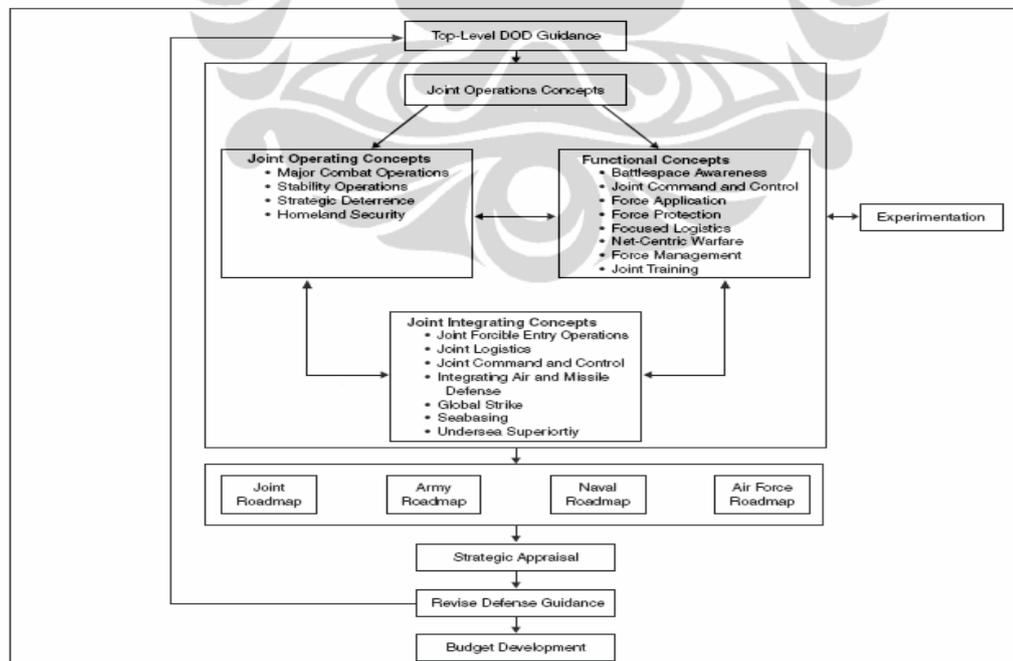
1.1.3 Kapabilitas Pertahanan

Jepang tanpa dapat dipungkiri adalah negara dengan kemampuan teknologi yang canggih dan mampu mencipta serta mengembangkan teknologi dengan hasil yang dapat dinikmati oleh sebagian besar warga dunia. Dalam bidang komputerisasi, Jepang termasuk negara yang unggul. Sehingga sangat rasional jika teknologi menjadi salah satu andalan yang dimiliki Jepang dalam peralatan tempurnya.

Ditunjang dengan PDB yang besar, pada tahun fiskal 2007, Departemen Pertahanan Jepang mengajukan anggaran hingga 4.86 triliun yen. Untuk pembelian misil penangkal, diajukan dana 219 miliar yen atau naik 56,5 persen dibanding anggaran tahun berjalan.⁵

Dengan kemampuan demikian, sangat terbuka bagi Jepang untuk meningkatkan kapabilitas atau kemampuan tempurnya.

Bagan 3. 3 Komponen Untuk Transformasi Kapabilitas Militer



Sumber : Analisis GAO untuk DOD Amerika Serikat⁶

⁵ Jepang Tingkatkan Anggaran Untuk Misil Penangkal, Koran Republika, 30 Agustus 2006.

⁶ *Military Transformation*, US GAO, Desember 2004

Dari bagan 3.3 tampak alur transformasi kapabilitas militer dan komponen-komponen yang diperlukan dalam peningkatan kapabilitas militer. Yang utama yaitu Top-Level DOD Guidance, merupakan pedoman bagi pimpinan Departemen Pertahanan yang akan berhubungan dengan revisi pedoman pertahanan. Komponen penting dalam transformasi kapabilitas militer adalah konsep *joint operations* yang dibedakan menjadi *joint operating concepts* yang terdiri dari *major combat operation*, *stability operation*, *strategic deterrence*, dan *homeland security* serta *functional concepts* yang terdiri dari *battlespace awareness*, *joint command and control*, *force application*, *force protection*, *focused logistics*, *net-centric warfare*, *force management*, dan *joint training*. Kedua komponen tersebut terhubung dengan *joint integrating concepts* yang kesemuanya merujuk pada pedoman bagi kerjasama, angkatan darat, laut, dan udara. Dengan demikian akan muncul kesepakatan strategik yang mengarah pada revisi pedoman pertahanan dan peningkatan anggaran pertahanan (lihat lampiran II hal 8).

Dalam NDPG 2005 disampaikan bahwa untuk mencapai misi pertahanannya Jepang menyiapkan langkah-langkah pengembangan kapabilitas pertahanannya, berupa peningkatan kapabilitas *joint operation*. Jepang membuat pusat organisasi untuk memfasilitasi *joint operations* dan membangun infrastruktur untuk pelatihan dan pendidikan serta untuk intelijen dan komunikasi. Untuk organisasi-organisasi yang telah ada dilakukan telaah kembali untuk meningkatkan efesiensinya (lihat lampiran I).

Selanjutnya, Jepang akan memperkuat kapabilitas intelijennya. Agar *Self Defence Force* dapat memberi respon secara efektif terhadap ancaman baru dan situasi yang bermacam-macam, maka sangat penting bagi pemerintah untuk dapat mengidentifikasi kejadian sedini mungkin dan mengumpulkan, menganalisa, serta menyebarkan informasi intelijen dengan tepat dan akurat. Untuk itu Jepang akan memperkuat kemampuan bermacam-macam kemampuan intelijen yang dimiliki dan meningkatkan kemampuan analisis dan perkiraan, dengan mempertimbangkan perubahan keamanan internasional dan trend teknologi yang ada. Jepang juga memperkuat struktur intelijen yang dimilikinya dengan

membangun markas intelijen pertahanan sehingga Jepang akan memiliki kapabilitas intelijen yang memuaskan.

Hal lain yang dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas pertahanannya yaitu menyatukan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam angkatan bersenjata Jepang. Jepang akan menggabungkan kedua elemen penting tersebut berupa teknologi informasi dan komunikasi dengan membangun dan mengembangkan sistem komando dan kontrol dan *agile intelligence sharing system* yang sangat dibutuhkan dalam *joint operations*. Selain itu, Jepang akan menciptakan sistem yang lebih maju untuk komando dan komunikasi dan jaringan untuk informasi dan komunikasi dengan perlindungan terhadap kemungkinan serangan cyber guna meningkatkan efisiensi operasional dan organisasi.

Berikutnya, guna peningkatan pengorganisasian sumber daya manusia yang lebih efisien Jepang memfokuskan pada peningkatan moral dan disiplin di kalangan pasukan. Tabel 3.1 berikut menggambarkan postur yang akan dikembangkan Jepang berdasarkan NDPG 2005.

Tabel 3. 1 Postur yang sedang dikembangkan Jepang

Ground Self-Defense Force	Personnel		155,000
	Regular		148,000
	Reserve (Ready Reserve Personnel)		7,000
	Major Units	Regionally Deployed Units	
Mobile Operation Units			1 armed division Central Readiness Force
Surface-to-Air Guided Missile Units			8 anti-aircraft artillery groups
Major Equipment	Tanks		Approx. 600
	Main Artillery		Approx. 600
Maritime Self-Defense Force	Major Units	Destroyer Units (for mobile operations)	4 flotillas (8 divisions)
		Destroyer Units (regional district units)	5 divisions
Submarine Units		4 divisions	
Minesweeper Unit		1 flotilla	
Patrol Aircraft Units		9 squadrons	
Major Equipment	Destroyers		47
	Submarines		16
	Combat Aircraft		Approx. 150
Air Self-Defense Force	Major Units	Air Warning and Control Units	8 warning groups 20 warning squadrons 1 airborne early-warning group (2 squadrons)
		Fighter Aircraft Units	12 squadrons
		Air Reconnaissance Unit	1 squadron
Air Transport Units		3 squadrons	
Aerial Refueling/Transport Unit		1 squadron	
Surface-to-Air Guided Missile Units		6 groups	
Major Equipment	Combat aircraft		Approx. 350
	Fighters		Approx. 260 ¹
Assets for Ballistic Missile Defense ²	Major Equipment	Aegis-equipped Destroyers	4
	Major Units	Air Warning and Control Units	7 warning groups 4 warning squadrons
Surface-to-Air Guided Missile Units			3 groups

Notes: 1. The number already included in total figure for combat aircraft, above

2. The numbers of units and equipment are already included in the Maritime and Air Self-Defense Forces sections above.

Dalam pengembangan program pertahanan jangka menengah Jepang (2005-2009) Jepang akan memperkuat kemampuan intelijen dengan modernisasi *electronic intelligence aircraft* (EP-3) dan mulai mengkonversi beberapa pesawat penyerang F-15 menjadi pesawat mata-mata.

Tabel 3.2 Sistem dan alat yang sedang Dikembangkan Departemen Pertahanan Jepang

Category	Item	Start of development (FY)	Features
Aircraft	Next fixed-wing maritime patrol aircraft and air carrier	2001	Next fixed-wing maritime patrol aircraft and air carrier planned to be operable from 2011 in order to replace P-3C and C-1. Low cost development will be achieved by commonality of applied technology.
	Unmanned aircraft research system	2004	System for operation of unmanned aircraft (fixed wing) that automatically gathers and transmits images and other data by autonomous flights, and returns. The system is achieved by establishing technologies for automatic running and landing, and image processing by unmanned aircrafts.
Guided missile	Type 99 air-to-air guided missile (remodeled)	2002	Intermediate-range air-to-air missile with improved functions and performance compared to the original Type-99 air-to-air guided missiles in survivability, shooting coverage, and jamming features
	Intermediate-range multipurpose missile	2004	Multipurpose missile used in infantry units and others to destroy enemy units in diverse situations
	Short-range SAM (Rev. II)	2005	Surface-to-air missile to provide overall air defense coverage in the operation area as a replacement of Type-81 short range surface-to-air guided missiles. It will also be used as major air defense means at bases.
	New guided missiles for ballistic missiles defense	2006	Advanced ship-board guided missiles for ballistic missiles defense that will be jointly developed by Japan and the U.S. It will have improved capability to respond to the threats of existing ballistic missiles, and potential to respond to advanced and diversified ballistic missiles.
Artillery and vehicle	New tank	2002	Tanks that will be used in tank units to replace the present tanks to destroy enemy units in diverse situations
	NBC detection vehicle	2005	Vehicle used by Chemical Protection Units (platoons) to promptly reconnoiter (e.g. detect, identify) a wide area contaminated by harmful chemical or biological agents, or radioactivity
Naval vessel and submersible equipment	New ASROC	1999	System equipped on destroyers to attack and destroy submarines in long distance by combined use with surface ship sonar systems
	New anti-submarine short torpedo	2005	Short torpedo for attacking advanced submarines that run in all sea areas from shallow to deep
Electronic devices	IRST system for fighters	2003	Infra-Red Search and Track (IRST) system used to complement the weakening detection capability of fire-control radar in electronic warfare environment and similar conditions, and fire control for air-to-air missiles on board, as well as detection and tracking of target
	Anti-aircraft combat command and control system	2004	System used by anti-aircraft artillery units to collect, process and transmit necessary information for anti-aircraft combat; and to implement prompt and accurate command and control needed in anti-aircraft combat unit
	Firing combat command and control system	2006	System used by field artillery units and others to collect, process and transmit target information; and to implement prompt and accurate command and control needed in firing combat
	New outdoor telecommunication system	2007	System for Regional Armies, Divisions, and other levels to assure continuous telecommunication for command, control, and communication
Others	Air-to-air small sized target	2006	Small sized, light weight, low cost targets that will be used in place of some multifunction and expensive targets that are presently used. It will be loaded on target mother planes (F-15) for various air-to-air missile fire training.

Sumber : www.mod.go.jp

Sistem utama dan perlengkapan yang sedang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Jepang sebagian besar berupa pengembangan dengan menggunakan teknologi. Kemajuan teknologi Jepang menjadi satu keuntungan dalam hal ini. Dari tabel 3.2. dapat dilihat bahwa pengembangan yang dilakukan Jepang meliputi pengembangan pesawat, rudal kendali, aliteri dan kendaraan tempur, kapal perang dan selam, dukungan elektronik, dan lainnya yang terkait.

Untuk kategori pesawat dalam Buku Putih Pertahanan Jepang Tahun 2007 dapat diketahui bahwa pesawat yang sedang dikembangkan oleh Jepang, sebagai berikut :

- a. Pesawat patroli maritim dan pesawat pengangkut. Pengembangan dimulai tahun 2001 dan direncanakan dioperasikan di tahun 2011 untuk menggantikan P-3C dan C-1. Pengembangan dengan biaya rendah dapat dilakukan dengan aplikasi teknologi didalamnya.
- b. Sistem penelitian pesawat tanpa awak, dimulai tahun 2004. Sistem ini dikembangkan untuk pesawat tanpa awak yang dapat mengumpulkan data dan mengirim image serta data pada saat terbang tanpa awak dan kembali lagi ke pangkalan. Sistem tersebut dikembangkan dengan membangun teknologi terbang dan mendarat secara otomatis, dan pemrosesan image oleh pesawat tanpa awak sehingga image dan data dapat terkirim dengan baik.

Berikutnya yang dikembangkan adalah rudal kendali yang meliputi, antara lain :

- a. Pengembangan rudal kendali tipe 99 *air-to-air* (remodel), dimulai tahun 2002. Rudal *air-to air* dengan jarak jangkauan menengah namun dengan perbaikan fungsi-fungsi dan performa dibanding rudal kendali tipe 99 *air-to-air* dalam segi survival dan jarak tembak.
- b. Rudal multifungsi jarak menengah, dimulai tahun 2004 merupakan rudal multifungsi yang digunakan di unit infantri dan yang lainnya untuk menghancurkan musuh.
- c. SAM jarak dekat (revisi II), dimulai tahun 2005, yaitu rudal *surface-to-air* menggantikan tipe-81.

- d. Rudal kendali baru untuk pertahanan rudal balistik, dimulai tahun 2006. Merupakan kerjasama dengan Amerika Serikat. Rudal ini akan dikembangkan kemampuannya untuk merespon ancaman rudal balistik dan potensial untuk merespon rudal balistik yang canggih dan bermacam-macam.

Selain pesawat dan rudal, Jepang juga mengembangkan altilerinya dan kendaraan tempurnya. Dimulai pada tahun 2002, Jepang menyiapkan tank baru untuk menggantikan posisi yang lama yang dapat digunakan untuk menghancurkan musuh dalam berbagai situasi.

Selain itu, dikembangkan pula kendaraan tempur pendeteksi NBC yang digunakan oleh unit proteksi kimia (platoons) untuk mendeteksi area yang terkontaminasi kimia berbahaya, virus biologi, atau radioaktif.

Untuk pengembangan di matra laut dikembangkan ASROC yang baru yang dimulai tahun 1999, merupakan system yang dilengkapi penghancur untuk menyerang dan menghancurkan kapal selam dalam jarak yang jauh melalui kombinasi penggunaan dengan surface ship sonar system. Dikembangkan pula torpedo anti kapal selam pada tahun 2005 untuk menyerang kapal selam baik dalam jarak dangkal maupun dalam.

Seorang dari pejabat Departemen Jepang menyatakan bahwa Jepang berencana mengembangkan dan membuat kapal selam nonnuklir generasi mendatang yang lebih senyap dan lebih tahan menghadapi serangan, serta memiliki kemampuan sonar yang lebih canggih. Proyek pengembangan dan pembuatan kapal selam itu diperkirakan akan menghabiskan 5,1 miliar yen (sekitar 42,9 juta dollar AS) untuk jangka waktu 10 tahun, yang dimulai pada April 2007. Proyek terbaru ini ditujukan terutama untuk mengurangi tingkat kebisingan dari baling-baling kapal selam guna meminimalkan risiko terdeteksi pihak lain. Selain itu ditingkatkan juga ketahanan terhadap guncangan bilamana diserang lawan.⁷

Jepang saat ini memiliki 16 kapal selam konvensional dan semuanya tidak bertenaga nuklir karena kebijakan Negara itu untuk tidak menggunakan nuklir

⁷ Jepang Kembangkan Kapal Selam Tercanggih, Kompas 18 Oktober 2006.

dalam urusan pertahanan dan keamanan, sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi Jepang. Proyok kapal selam muncul disaat ketegangan militer meningkat di Semenanjung Korea, sejak Korea Utara melakukan tes nuklir pada 9 Oktober 2006.

1.1.4 Gelar Kekuatan Pertahanan

Gelar pasukan dimaksudkan untuk memaksimalkan fungsi dan efektifitas pasukan di wilayah-wilayah yang dinilai memiliki ancaman atau memiliki sumber daya yang perlu dilindungi.

Gelar pasukan dibagi sesuai dengan matranya masing-masing, yaitu darat, laut, dan udara.

Data yang digunakan adalah data Buku Putih Pertahanan Jepang tahun 2005 dan 2007. Hal itu dilakukan mengingat adanya perubahan mendasar dari pertahanan Jepang pada 9 Januari 2007, yaitu perubahan dari Badan Pertahanan menjadi Kementerian Pertahanan. Dengan melihat dua data tersebut, secara faktual dapat diamati persebaran pasukan Jepang.

Berdasarkan Buku Putih Pertahanan Jepang per 31 Maret 2005, pada periode itu pasukan Jepang ditempatkan pada wilayah seperti yang tertera pada gambar 3.1 dan per 31 Maret 2007 persebaran pasukan seperti ditunjukkan dalam gambar 3.2.

Persebaran personil ada pada unit-unit berikut, yaitu :⁸

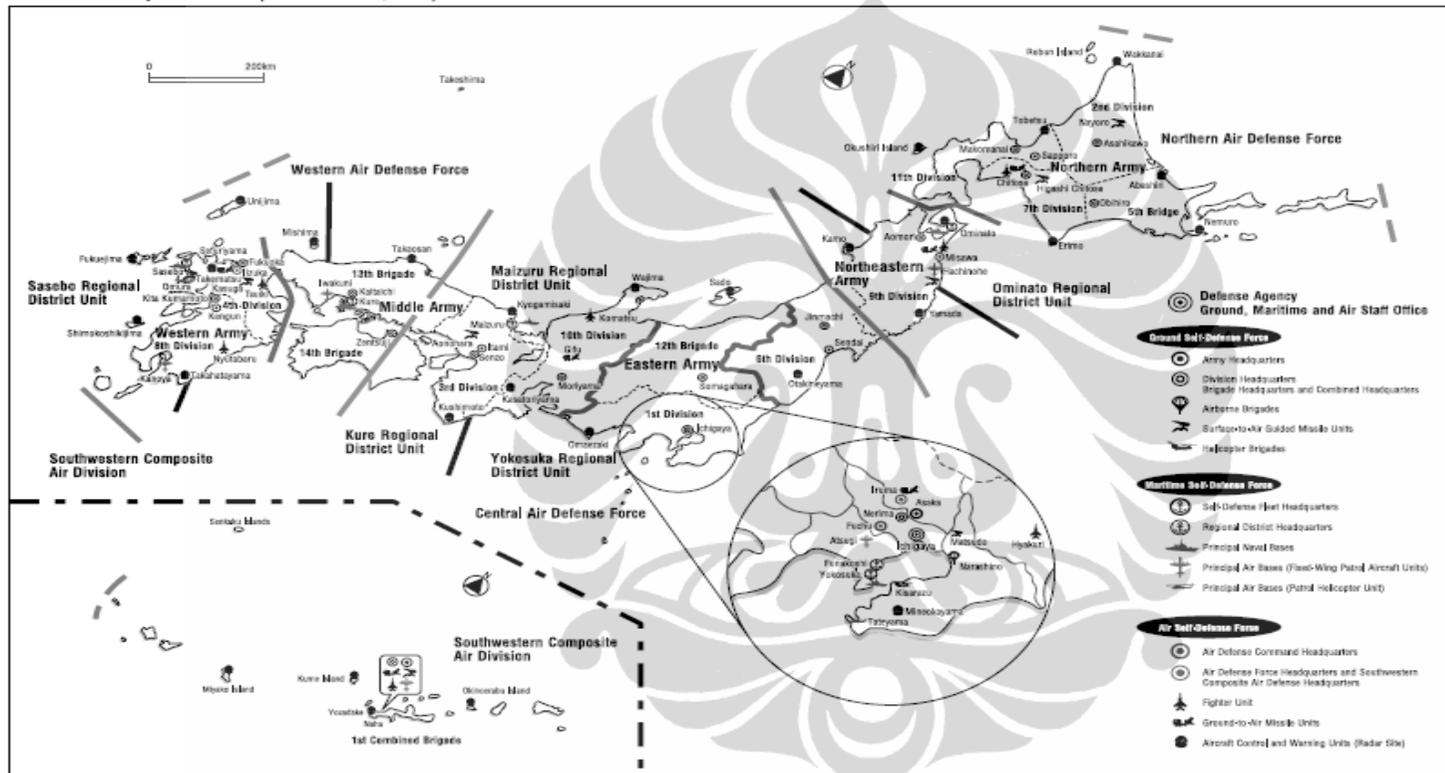
1. Departemen Pertahanan Jepang
Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
2. Pasukan Bela Diri Darat, terdiri dari :
 - Pangkalan Angkatan Darat.
 - Pangkalan Pusat Pasukan Siaga.
 - Pangkalan Divisi, Pangkalan Brigade, dan Pangkalan Gabungan.
 - Brigade Terjun Payung
 - Unit Rudal Kendali Surface-to-Air

⁸ www.mod.go.jp

- Brigade Helikopter
- 3. Angkatan Laut, terdiri dari :
 - Pangkalan Angkatan Laut
 - Pangkalan Distrik Regional
 - Basis Pusat Angkatan Laut
 - Basis Pusat Angkatan Udara (Unit Pesawat Patroli)
 - Basis Pusat Angkatan Udara (Unit Helikopter Patroli)
- 4. Angkatan Udara, terdiri dari :
 - Pangkalan Angkatan Udara
 - Pangkalan Pasukan Angkatan Udara dan Pangkalan Divisi Gabungan Udara Southwestern
 - Unit Penyerang
 - Unit Rudal Kendali Surface-to-Air
 - Kontrol Pesawat dan Unit Pengawas (Site Radar).

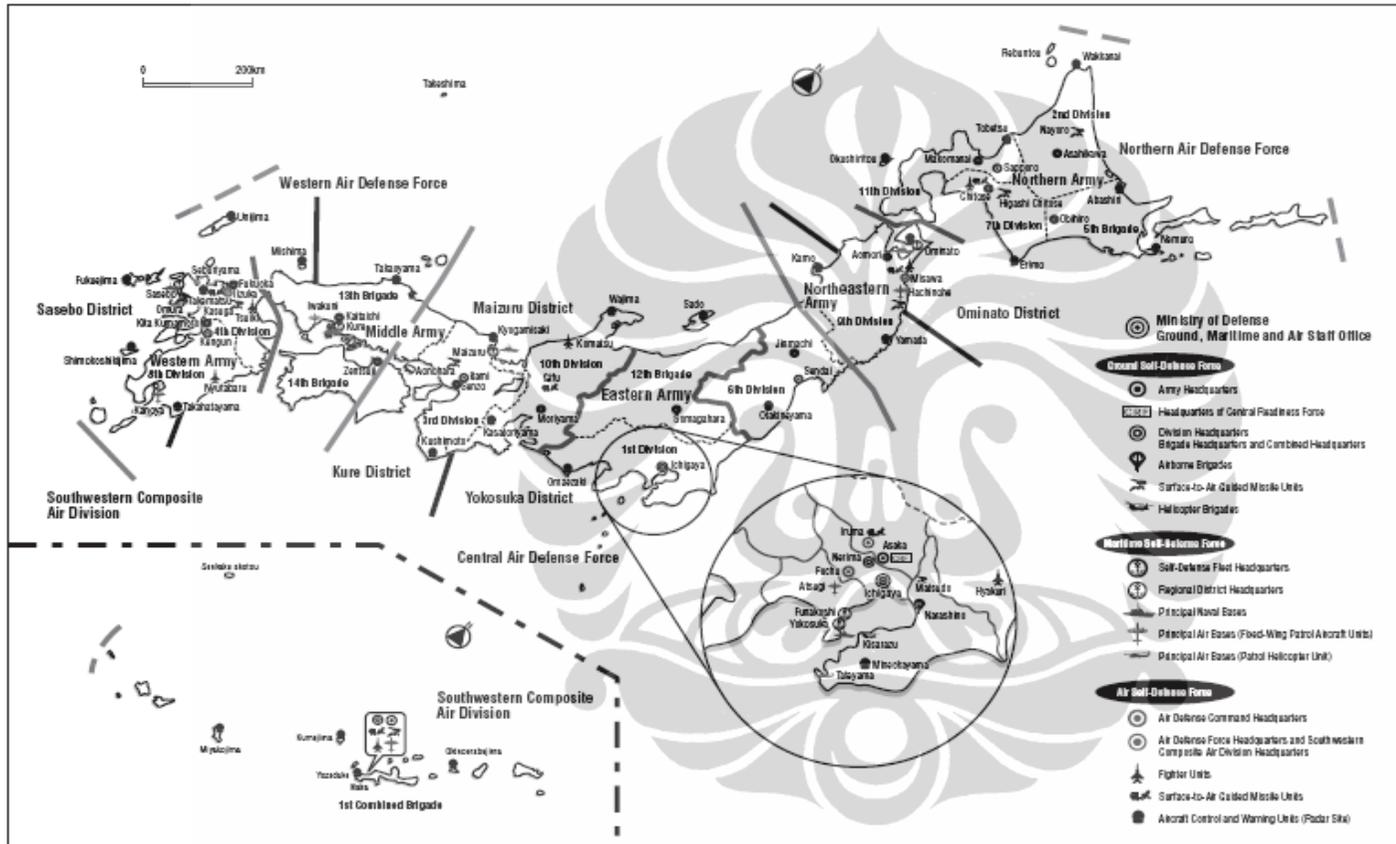
Persebaran pasukan meliputi Northern Army, Northwestern Army, Eastern Army, Middle Army, dan Western Army

Gambar 3. 1. Persebaran Pasukan Bela Diri Jepang per 31 Maret 2005



Sumber : www.mod.go.jp, diakses 20 April 2008

Gambar 3. 2. Persebaran Pasukan Bela Diri Jepang per 31 Maret 2007



Sumber : www.mod.go.jp , diakses 20 April 2008

Sementara kekuatan terdiri atas pengukuran kuantitas personel dan peralatan yang dimiliki oleh pasukan Jepang.

Tabel 3.3 Personel Departemen Pertahanan Jepang

(As of March 31, 2007)

Personnel of the Ministry of Defense	Special Service	Minister of Defense		
		Senior Vice-Minister of Defense		
		Parliamentary Secretary for Defense (2)		
		Authorized Strength	Private Secretary (Special Assistant to the Minister)	
			SDF Personnel	Vice-Minister of Defense
		Director General, and others		372
		Administrative Officials, and others		22,856
		SDF Regular Personnel		251,222
		Ready Reserve Personnel		8,368
		Reserve Personnel		47,900
	Candidate for Reserve Personnel	1,995		
	National Defense Academy students			
	National Defense Medical College students			
	Part-Time Officials			
Regular Service	Authorized Strength	Administrative Officials, and others	30	
	Non-Authorized Strength	Part-Time Officials		

Sumber : www.mod.go.jp

Dari tabel 3.3 di atas dapat diamati kekuatan terkini Pasukan Bela Diri Jepang per 31 Maret 2007. Jika dibandingkan dengan tahun 1995, maka kenaikan jumlah personel mengalami kenaikan lebih dari 50%.

Sementara dari tabel 3.4 di halaman berikut terlihat bahwa Jepang memiliki 148000 personel angkatan darat. Merupakan perbandingan yang sangat jauh dengan China yang memiliki 1600000 personel. Angka yang dimiliki Jepang juga masih dibawah Korea Utara yang juga dianggap sebagai ancaman oleh Jepang.

Pada angkatan lautnya, Jepang memiliki kekuatan yang cukup besar. Menempati urutan kelima setelah Amerika Serikat, Russia, China, dan Inggris dengan jumlah kekuatan 428000 ton dan memiliki 150 kapal.

Sementara itu angkatan udara Jepang memiliki 440 pesawat tempur.

Tabel. 3. 4 Outline Perkiraan Jumlah Kekuatan Militer Negara Besar dan Regional

Ground Forces		Naval Forces			Air Forces	
Country or region	Ground forces (10,000 persons)	Country or region	Tonnage (10,000 tons)	Number of vessels	Country or region	Number of combat aircraft
China	160	United States	571.1	1,120	United States	3,560*
India	110	Russia	211.0	870	China	3,530*
North Korea	100	China	107.5	780	Russia	2,320*
Republic of Korea	56	United Kingdom	88.0	240	India	990*
Pakistan	55	France	39.3	250	Syria	630
United States	49	India	34.8	150	Egypt	630*
Viet Nam	41	Turkey	21.1	200	Republic of Korea	600*
Turkey	40	Taiwan	20.5	340	North Korea	590
Russia	40	Spain	20.3	130	Turkey	540
Iran	35	Germany	20.0	140	Taiwan	530*
Myanmar	35	Italy	18.4	170	Israel	440
Egypt	34	Indonesia	18.1	180	Pakistan	430*
Indonesia	23	Brazil	17.9	120	Germany	430*
Syria	20	Australia	15.2	80	France	420*
Taiwan	20	Republic of Korea	13.5	180	Ukraine	380
Japan	14.8	Japan	42.8	150	Japan	440

- Catatan : - Data Angkatan Darat dan Angkatan Udara diperoleh dari *Military Balance 2006* dan data Angkatan Laut diperoleh dari *Jane's Fighting Ships 2005-2006*.
- Kekuatan Militer Jepang adalah kekuatan SDF pada akhir 2005.
 - Disusun berdasarkan skala kekuatan pasukan

Tabel 3.5 Outline Perkiraan Jumlah Pasukan Reguler dan Pasukan Cadangan Negara Besar dan Regional

Country or Region	Military Service System	Regulars (10,000 persons)	Reserves (10,000 persons)	
United States	Volunteer	155	96	
Russia	Conscription/Volunteer	103	2000	
United Kingdom	Volunteer	22	24	
France	Volunteer	25	2	
Germany	Conscription	28	35	
Italy	Volunteer	19	6	
India	Volunteer	133	116	
China	Conscription	226	80	
North Korea	Conscription	110	65	
Republic of Korea	Conscription	69	450	
Egypt	Conscription	47	48	
Israel	Conscription	17	41	
Japan	Volunteer	Army	14.8	3.4 (0.6)
		Navy	4.5	0.1
		Air Force	4.6	0.08

Sumber : www.mod.go.jp

Tabel 3.6 Jumlah Tentara Jepang Per Angkatan

Category	GSDF	MSDF	ASDF	Joint Staff Council, etc.	Total
Authorized	156,122	45,806	47,332	2,322	251,582
Actual	148,302	44,528	45,913	2,069	240,812
Staffing rate (%)	95.0	97.2	97.0	89.1	95.7

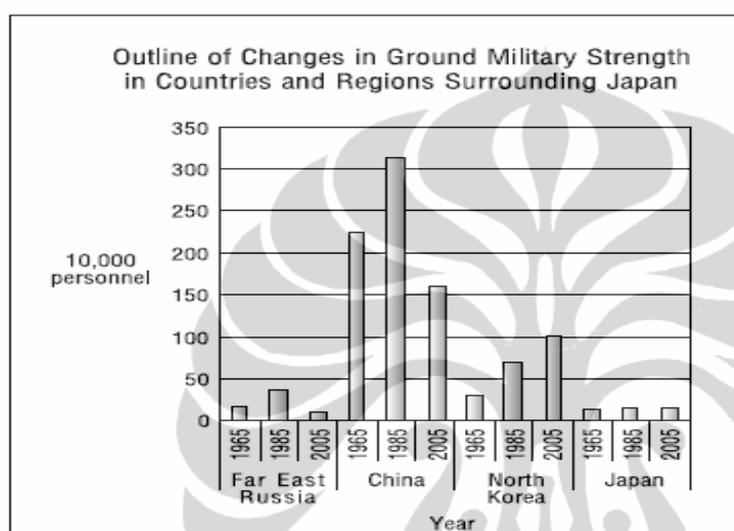
Category	Non-Fixed-Term Personnel				Fixed-Term Personnel
	Officer	Warrant Officer	Enlisted (upper)	Enlisted (lower)	Enlisted (lower)
Authorized	44,533	5,215	138,649	63,185	
Actual	41,311 (1,623)	4,945 (2)	136,873 (5,092)	18,533 (1,368)	39,150 (3,364)
Staffing rate (%)	92.8	94.8	98.7	91.3	

Note: Figures in parentheses denote the number of females included in the preceding value.

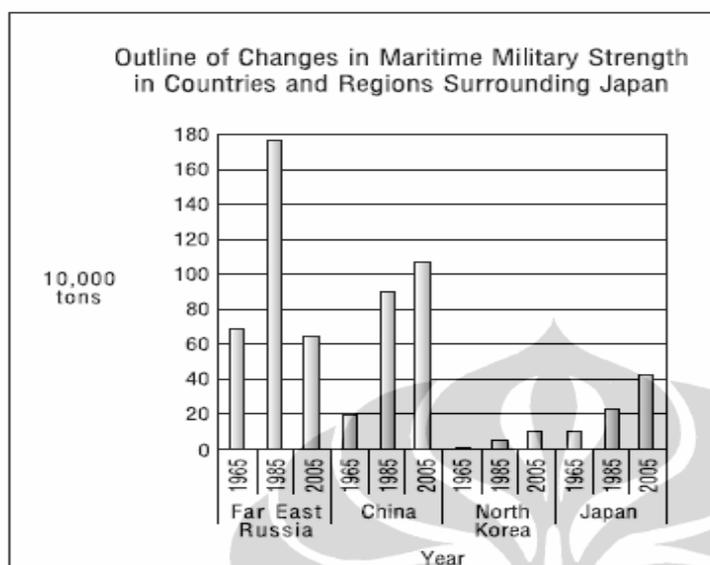
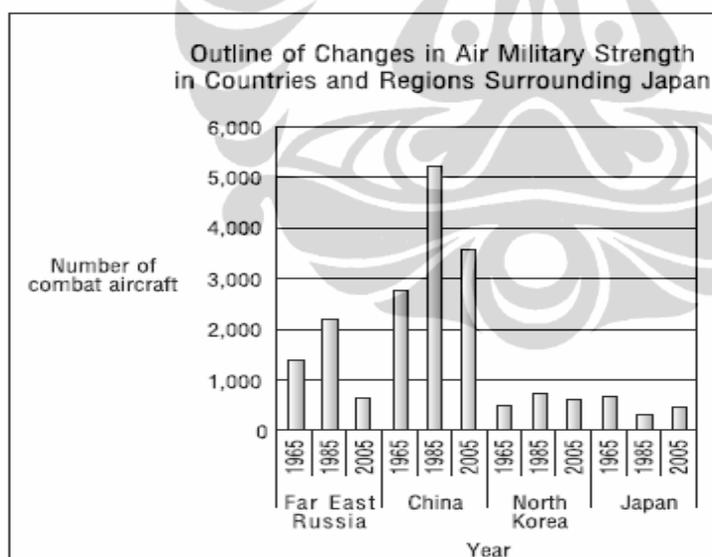
Sumber : Buku Putih Pertahanan Jepang 2007

Berikut adalah diagram yang menunjukkan perubahan kekuatan militer negara-negara di sekitar Jepang yang menjadi pertimbangan bagi Jepang dalam meningkatkan kapabilitas pertahanannya.

Diagram 3. 1 Perubahan Kekuatan Militer Angkatan Darat



Dengan melihat diagram tampak bahwa Angkatan Darat Jepang dari segi perkembangan kekuatan cenderung stabil. Hal ini berbeda dengan perkembangan kekuatan pada Angkatan laut, seperti yang tampak pada diagram berikutnya. Dapat diamati bahwa perkembangan kekuatan Angkatan Laut Jepang mengalami peningkatan yang signifikan. Hal itu dimungkinkan karena Jepang yang walaupun memiliki pendapatan negara yang besar, namun dari sisi sumber daya alam memiliki sumber daya alam yang minim. Karenanya, Jepang menjadi tergantung pada suplai dari negara-negara sekitarnya, terutama untuk asupan energi yang sangat dibutuhkan oleh Jepang. Untuk mengamankan jalur lautnya, maka peningkatan kekuatan di Angkatan laut Jepang menjadi hal yang rasional untuk dilakukan. Selain itu, permasalahan di Cina Selatan adalah hal yang esensial bagi Jepang. Jalur ekonomi dan jalur persediaan sumber daya alamnya melewati laut tersebut.

Diagram 3. 2 Perubahan Kekuatan Militer Angkatan Laut**Diagram 3. 3 Perubahan Kekuatan Militer Angkatan Udara**

Sumber : Buku Putih Pertahanan Jepang

Perubahan kekuatan militer Jepang pada Angkatan Udara menunjukkan bahwa ada kenaikan dalam kekuatan angkatan Udara Jepang. Walaupun dibandingkan dengan China pengembangan kekuatan Jepang tampak berbeda jauh.

Dalam tabel perubahan kekuatan Militer Jepang diambil rentang tahun 1965, 1985, dan 2005. Hal tersebut mengindikasikan perubahan dari kekuatan Militer Jepang pasca Perang Dunia II (1965), Masa Perang Dingin (1985) dan pasca perang dingin (2005)

1.1.5 Anggaran Pertahanan

Sebagai hasil dari revisi NDPO 1995 Jepang menjalani perubahan dalam tatanan militernya. Perubahan yang dilakukan adalah peningkatan kapabilitas dari segi kuantitas untuk menghadapi kondisi keamanan internasional yang berubah-ubah. Upaya perubahan yang dilakukan Jepang tersebut terdesak karena penurunan ekonomi Jepang sejak 1990-an dan tekanan untuk membatasi pengeluaran pertahanan.

Jika dihitung dalam nominal dolar, total anggaran pertahanan Jepang telah mulai naik secara signifikan setelah akhir perang dingin, yaitu pada angka 40 milyar. Namun angka tersebut diinflasi oleh kuatnya nilai tukar yen terhadap dolar. Jika anggaran pertahanan Jepang di kalkulasi dalam yen, maka anggaran pertahanan tersebut terlihat stagnan dan cenderung menurun sejak 1997. Sejak akhir 1990-an, jatuhnya nilai yen telah membuat kejatuhan nilai dolar dalam anggaran pertahanan Jepang. Anggaran dengan angka 5 trilyun yen tampaknya dianggap sebagai angka pengeluaran pertahanan Jepang.

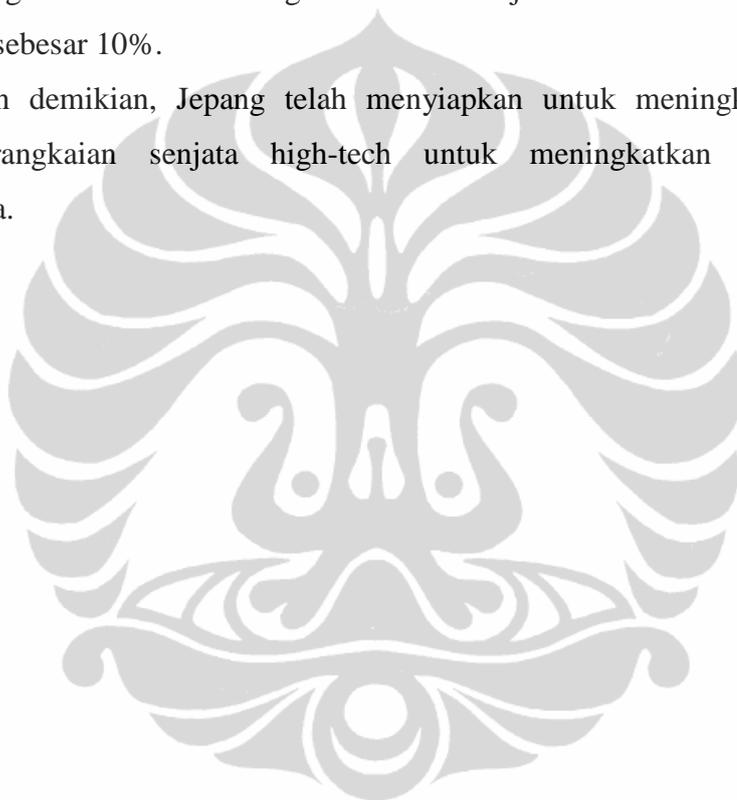
Selain itu, anggaran pengadaan untuk pembelian persenjataan dan perlengkapan turut mengalami stagnasi dan menurun, mencapai sekitar 0,9 trilyun yen sepanjang dekade terakhir. Pendapatan anggaran pertahanan dari total pengeluaran pemerintah stabil pada angka 6%. Peningkatan angka pengeluaran pertahanan pun berada di bawah 1%. Nilai ini termasuk strategi politik adaptasi Jepang untuk mencegah anggapan negara sekitarnya bahwa Jepang berpotensi sebagai ancaman.

Stagnasi dari anggaran pertahanan Jepang kontras dengan negara non-Eropa yang dominan menaikkan anggaran pertahanannya setelah Perang Dingin berakhir. Akhirnya, jumlah anggaran pertahanan Jepang dan pembelian senjata perlu dilakukan untuk memordenisasi pasukan bela dirinya. Dari fakta tampak

bahwa 45% dari anggaran digunakan untuk pembiayaan personel dan hanya 19% dari anggaran yang dimanfaatkan untuk pembelian senjata baru.

Oleh sebab itu, Jepang masih memiliki potensi yang besar untuk menaikkan anggaran pertahanannya dan menyesuaikan dengan tingkat ekonomi yang dimilikinya. Antara 1996 dan 2003, kekuatan tank angkatan darat telah dikurangi dari 1110 menjadi hanya 1000, Kapal penghancur (destroyer) pada angkatan laut dikurangi dari 58 menjadi 54, sementara pesawat penyerang (fighter) di angkatan udara dikurangi dari 431 menjadi 363. Semua mengalami pengurangan sebesar 10%.

Namun demikian, Jepang telah menyiapkan untuk meningkatkan dan membeli serangkaian senjata high-tech untuk meningkatkan kapabilitas pertahanannya.



Tabel 3. 7 Trend Pengeluaran Pertahanan di Negara-Negara Utama di Dunia

Country	Fiscal Year	2003	2004	2005	2006	2007
Japan (100 million yen)		49,265	48,764	48,301	47,906	47,818
		49,530	49,030	48,564	48,139	48,016
		-0.3%	-1.0%	-1.0%	-0.8%	-0.2%
		-0.1%	-1.0%	-1.0%	-0.9%	-0.3%
U.S. (US\$1 million)		387,170	436,453	474,089	499,310	548,885
		16.7%	12.7%	8.6%	5.3%	9.9%
U.K. (GBP 1 million)		29,338	29,524	29,153	32,600	-
		7.3%	0.6%	-1.3%	11.8%	-
Germany (€1 million)		24,379	24,250	24,040	27,870	-
		3.2%	-0.5%	-0.9%	15.9%	-
France (€1 million)		31,070	32,402	32,920	36,061	-
		7.5%	4.3%	1.6%	9.5%	-
Russia (RR 100 million)		3,603,256	4,187,183	5,311,392	6,660,266	8,222,035
		26.8%	16.2%	26.8%	25.4%	23.4%
China (100 million yuan)		1,853	2,100	2,447	2,807	3,472
		10.0%	13.3%	16.5%	14.7%	23.7%

- Notes: 1. Data sources are national budget books, defense white papers and others.
2. % represents a rate of growth over the previous year.
3. U.S. defense expenditures represent the expense narrowly defined by the historical table FY 2008.
4. The figures for the United Kingdom up to FY 2005 are based on U.K. Defense Statistics published by its Ministry of Defense. The figure in FY 2006 is the expected amount announced in the budget message.
5. The German defense expenditures rose sharply in FY 2006 because the data began to include pension expenditures. The defense expenditures actually decreased by 0.7% in comparison with FY 2005 when the pension expenditures are excluded.
6. Data for China is based on the Finance Minister's Budget Report to the National People's Congress. For the National Defense Budget 2004, China's fiscal report stated national defense expenditures would increase, "11.6% by 21.83 billion yuan." The total expenditures, however, have not been revealed. As there is a discrepancy in the calculation made on the figures in the said report based on the FY 2003 defense budget, calculations are made based on the assumed actual expenditure amounts in 2001 and 2003 (unpublished).
7. According to tables and analyses in part two of *Military Balance 2007* outlining an international comparison of defense spending and military strength, defense expenditures for FY 2005 were: U.S. \$495,300 million, U.K. \$51,696 million, Germany \$35,295 million, France \$46,232 million, Russia \$58,000 million, China \$103,956 million and Japan \$42,835 million.
8. As for Japan, the upper figures exclude the cost for SACO-related projects (16.5 billion yen in FY 2001, 16.6 billion yen in FY 2002, 26.5 billion yen in FY 2003, 26.6 billion yen in FY 2004, 26.3 billion yen in FY 2005, 23.3 billion yen in FY 2006, and 12.6 billion yen in FY 2007) as well as U.S. Forces realignment-related expenses (reduction of burden on local communities) (7.2 billion yen in FY 2007), while the lower figures include them.

Tabel 3. 8 Pola Belanja Pertahanan Jepang (Anggaran Dasar)

Reference 20. Pattern of Defense-Related Expenditures (Original Budget Basis)

(Unit: 100 million yen, %)

Fiscal Year	GNP/GDP (Original estimates) (A)	Annual Expenditures on General Account (B)	Growth Rate from Previous Year	General Annual Expenditures (C)	Growth Rate from Previous Year	Defense-Related Expenditures (D)	Growth Rate from Previous Year	Ratio of Defense-Related Expenditures to GNP/GDP (D/A)	Ratio of Defense-Related Expenditures to Annual Expenditures on General Account (D/B)	Ratio of Defense-related Expenditures to General Annual Expenditures (D/C)
1955	75,590	9,915	-0.8	8,107	-2.8	1,349	-3.3	1.78	13.61	16.6
1965	281,600	36,581	12.4	29,198	12.8	3,014	9.6	1.07	8.24	10.3
1975	1,585,000	212,888	24.5	158,408	23.2	13,273	21.4	0.84	6.23	8.4
1985	3,146,000	524,996	3.7	325,854	-0.0	31,371	6.9	0.997	5.98	9.6
1995	4,928,000	709,871	-2.9	421,417	3.1	47,236	0.86	0.959	6.65	11.2
1996	4,960,000	751,049	5.8	431,409	2.4	48,455	2.58	0.977	6.45	11.2
1997	5,158,000	773,900	3.0	438,067	1.5	49,414 49,475	1.98 2.1	0.958 0.959	6.39 6.39	11.3 11.3
1998	5,197,000	776,692	0.4	445,362	1.7	49,290 49,397	-0.3 -0.2	0.948 0.950	6.35 6.36	11.1 11.1
1999	4,963,000	818,601	5.4	468,878	5.3	49,201 49,322	-0.2 -0.2	0.991 0.994	6.01 6.03	10.5 10.5
2000	4,989,000	849,871	3.8	480,914	2.6	49,218 49,358	0.0 0.1	0.987 0.989	5.79 5.81	10.2 10.3
2001	5,186,000	826,524	-2.7	486,589	1.2	49,388 49,553	0.3 0.4	0.952 0.956	5.98 6.00	10.1 10.2
2002	4,962,000	812,300	-1.7	475,472	-2.3	49,395 49,560	0.0 0.0	0.995 0.999	6.08 6.10	10.4 10.4
2003	4,986,000	817,891	0.7	476,922	0.1	49,265 49,530	-0.3 -0.1	0.988 0.993	6.02 6.06	10.4 10.4
2004	5,006,000	821,109	0.4	476,320	0.1	48,764 49,030	-1.0 -1.0	0.974 0.979	5.94 5.97	10.2 10.3
2005	5,115,000	821,829	0.1	472,829	-0.7	48,301 48,564	-1.0 -1.0	0.944 0.949	5.88 5.91	10.2 10.3
2006	5,139,000	796,860	-3.0	463,660	-1.9	47,906 48,139	-0.8 -0.9	0.932 0.937	6.01 6.04	10.3 10.4
2007	5,219,000	829,088	4.0	469,784	1.3	47,818 48,016	-0.2 -0.3	0.916 0.916	5.77 5.79	10.2 10.2

Tabel 3. 9 Perubahan Belanja Pertahanan.

(Unit: 100 million yen, %)

Item Fiscal Year	Annual Expenditures on General Account	National Defense	Composition Ratio	Social Security	Composition Ratio	Education and Science	Composition Ratio	Public Works	Composition Ratio
1955	9,915	1,349	13.6	1,043	10.5	1,308	13.2	1,635	16.5
1965	36,581	3,014	8.2	5,183	14.2	4,751	13.0	7,333	20.0
1975	212,888	13,273	6.2	39,282	18.5	25,921	12.2	29,120	13.7
1985	524,996	31,371	5.98	95,740	18.2	48,409	9.2	63,689	12.1
1995	709,871	47,236	6.7	139,368	19.6	60,765	8.6	92,413	13.0
1996	751,049	48,455	6.5	143,014	19.0	62,270	8.3	96,210	12.8
1997	773,900	49,414 49,475	6.4 6.4	145,650	18.8	63,436	8.2	97,490	12.6
1998	776,692	49,290 49,397	6.3 6.4	148,598	19.1	63,457	8.2	89,891	11.6
1999	818,601	49,201 49,322	6.0 6.0	161,123	19.7	64,632	7.9	94,338	11.5
2000	849,871	49,218 49,358	5.8 5.8	167,666	19.7	65,285	7.7	94,340	11.1
2001	826,524	49,388 49,553	6.0 6.0	176,156	21.7	66,472	8.0	94,335	11.6
2002	812,300	49,395 49,560	6.1 6.1	182,795	22.5	66,998	8.2	84,239	10.4
2003	817,891	49,265 49,530	6.0 6.1	189,907	23.2	64,712	7.9	80,971	9.9
2004	821,109	48,764 49,030	5.9 6.0	197,970	24.1	61,330	7.5	78,159	9.5
2005	821,829	48,301 48,564	5.9 5.9	203,808	24.8	57,235	7.0	75,310	9.2
2006	796,860	47,906 48,139	6.0 6.0	205,739	25.8	52,671	6.6	72,015	9.0
2007	829,088	47,818 48,016	5.8 5.8	211,409	25.5	52,743	6.4	69,473	8.4

3.2 Perkembangan Teknologi Pertahanan

Pengembangan teknologi menjadi salah satu elemen transformasi. Khawatir pada Korea Utara, Kementerian Pertahanan Jepang akan mengusulkan anggaran sebesar lebih dari 1 miliar dollar AS pada rencana anggaran Pemerintah Jepang tahun mendatang. Dana ini akan dipakai untuk membeli sistem pertahanan rudal.

Kementerian Pertahanan Jepang juga berencana meningkatkan kemampuan serangan udara-ke-darat dengan membeli sistem pemandu GPS (*global positioning system*) dari Amerika Serikat (AS).

Menurut harian Mainichi Shimbun, GPS akan mengubah bom-bom milik angkatan udara Jepang menjadi "bom-bom pintar".

Para pejabat Jepang berulang kali telah diperingatkan bahwa mereka tak punya kemampuan mempertahankan diri terhadap Korea Utara (Korut), yang pada bulan Agustus 1998 pernah menembakkan sebuah rudal balistik dan melewati wilayah udara Jepang. Korut diperkirakan juga telah memproduksi satu atau dua unit bom atom. Berita soal usulan anggaran ini muncul beberapa hari sebelum kelangsungan pertemuan enam negara untuk membicarakan program nuklir Korea di Beijing, 27 Agustus mendatang.

Harian ekonomi Nihon Keizai Shimbun melaporkan, Kementerian Pertahanan diperkirakan akan mengusulkan anggaran sebesar sekitar 140 miliar yen (1,19 miliar dollar AS) dalam tahun anggaran mendatang, yang dimulai bulan April 2004. Sebagian besar dana tersebut akan digunakan untuk membeli sistem pertahanan rudal AS. Jepang ingin memiliki sistem rudal Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3), versi baru dari sistem PAC-2 yang telah dimiliki angkatan udaranya.

Dalam dokumen itu, Departemen Pertahanan Jepang juga menyatakan keinginan untuk mempercanggih empat kapal perusak bernama Aegis. Kapal-kapal perang itu kini dilengkapi sistem teknologi tinggi pendeteksi rudal dan sistem pertahanan yang mencakup Rudal Standar-3 (SM-3).

Seorang pejabat pertahanan menepis anggapan bahwa sistem yang hendak dibeli itu akan membuat Jepang memiliki kemampuan menyerang negara lain. Menurut dia, hal ini karena Angkatan Udara Jepang tak memiliki kemampuan untuk melumpuhkan sistem radar musuh.

Usulan masih harus disetujui parlemen dan diduga akan memicu perdebatan sengit. Menurut konstitusi, Jepang dilarang menggunakan cara perang untuk menyelesaikan sengketa internasional. Hal ini bertujuan untuk membatasi kekuatan militer Jepang.

Kementerian Pertahanan Jepang sedang mempertimbangkan untuk membeli pesawat tempur siluman F-22A dan pesawat tempur F-15FX guna mengganti sejumlah jet tempurnya yang sudah tua. Kementerian mempertimbangkan opsi-opsi karena pihaknya berencana akan mulai menggantikan armada 60 pesawat tempur F-4 miliknya sebagai pesawat latih.

Satu larangan Kongres AS mengenai ekspor jet tempur paling canggih dan paling mahal, F-22 Raptor yang diproduksi Lockheed Martin dan Boeing, menimbulkan kemungkinan bahwa Jepang akan berusaha mencari pilihan lain, termasuk jet-jet Eropa. Tapi Kyodo mengatakan para pejabat kementerian pertahanan Jepang yakin larangan itu akan dicabut di masa mendatang.

Tabel 3. 10 Pengembangan Militer Jepang Yang Telah Selesai Dilakukan

Category	Item	Development Began (fiscal year)	Features
Aircraft	Observation helicopter (OH-1)	1992–1999	Small observation helicopter developed as follow-on to the OH-6D and used for observation by the GSDF
	Support Fighter (F-2)	1998–2000	Support fighter that is the follow-on aircraft to the F-1
	Patrol helicopter (sea-based)	1997–2004	Sea-based patrol helicopter enhanced with operational capabilities for anti-submarine and anti-ship warfare based on current SH-60J
Guided missiles	Type-99 air-to-air missile	1994–1998	Capable of effectively attacking aircraft which will become threats in air battles in the early 2000s
	Type-01 light anti-tank missile	1997–2000	Lightweight antitank missile that attempts a decrease in the number of operating personnel and improvements for survival, as the successor to the 84 mm recoilless gun
	Type-03 intermediate-range surface-to-air missile	1996–2002	High-mobility, labor- and power-saving intermediate-range surface-to-air missiles, replacement of the improved Hawk surface-to-air guided missile
	Type-04 air-to-air missile	1998–2003	Short-range air-to-air missiles which are capable of effectively attacking threatening aircraft in visual distance air battles expected in the early 2000s
Artillery, combat vehicles	Type-99 155mm self-propelled howitzer	1994–1998	Self-propelled howitzer developed as a follow-on to the Type-75 155 mm self-propelled howitzer and used in a firepower battle over a wide range from far distances to close range
	Mobile armored light-armed carrier	1997–2000	Vehicle provided to ordinary regiments to be able to battle with maneuverability
	Improved conventional munition for the 155 mm howitzers	1996–2002	Improved conventional munition are shot from the 155 mm howitzers and mainly used to counter quite a number of light armored targets
Vessels, submersible equipment	Type-97 torpedo	1989–1996	Aircraft and surface ship equipment for use in anti-submarine attacks developed as a follow-on to the MK46
	Next-generation submarine system	1997–2002	A new propulsion and integrated submarine control system installed in submarines to make their combat capabilities more effective
Electronic devices	Advanced technology to combat system for surface ship	1992–2000	Installed in destroyers to enhance their respective combat capabilities in the air, and on or under water
	Regimental command and control system for core regiments	2001–2004	Furnished for infantry and battle tank regiments to collect, process and communicate information required in close combat, and carry out command and control of close combat units promptly and adequately

Sumber : Buku Putih Pertahanan Jepang 2007

BAB IV
RESPON NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA TERHADAP
PERUBAHAN KEBIJAKAN PERTAHANAN JEPANG PASCA PERANG
DINGIN (1990-2007)

Politik adaptasi yang dilakukan Jepang di bidang pertahanan berupa transformasi pertahanan membawa pengaruh pada lingkungan eksternalnya. Sebagai salah satu komunitas yang berada di kawasan Asia, negara-negara Asia Tenggara banyak mendapat sokongan dari Jepang dari segi ekonomi berupa ODA. Jepang juga mendapat sokongan bahan baku dari negara-negara Asia Tenggara.

Perubahan kebijakan Jepang di bidang pertahanan yang membawa pada transformasi pertahanan memberi pengaruh langsung maupun tidak langsung kepada negara-negara Asia Tenggara. Bentuk respon yang diberikan pada kebijakan pertahanan Jepang tersebut akan dianalisa dengan melihat pada kebijakan luar negeri bidang pertahanan negara-negara Asia Tenggara, perubahan struktur pertahanan yang dilakukan berupa kerjasama bilateral maupun multilateral bidang pertahanan atau perubahan postur, serta adaptasi yang dilakukan. Dengan melihat aspek-aspek tersebut di atas akan terlihat bentuk respon negatif/positif yang diberikan negara-negara Asia Tenggara terhadap perubahan kebijakan pertahanan yang dilakukan Jepang. Respon negatif/positif tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi Jepang dalam menentukan politik adaptasinya. Walaupun dari sisi bantuan dana Jepang memberi andil bagi negara-negara Asia Tenggara, namun Jepang juga memerlukan sumber bahan baku dari negara-negara tersebut, sehingga termasuk penting bagi Jepang untuk menjaga kepentingan internal negaranya dengan menjaga stabilitas keamanan di kawasan tersebut.

ASEAN sebagai organisasi negara-negara Asia Tenggara memberikan gambaran tentang pandangan negara-negara Asia Tenggara terhadap dinamika pertahanan dan keamanan, termasuk transformasi pertahanan yang dilakukan Jepang. Dari tujuh maksud dan tujuan yang tercantum dalam deklarasi ASEAN hanya satu yang berhubungan dengan masalah perdamaian dan keamanan regional. Hal itu terjadi karena para pendiri ASEAN menghindari persepsi sebagai

organisasi baru yang berorientasi sebagai pakta pertahanan atau aliansi militer atau akan mendukung salah satu kelompok pada masa perang dingin.

Dalam sebuah seminar ASEAN yang diselenggarakan di Jakarta pada Agustus 1996, Ali Alatas (pada saat itu menjabat Menteri Luar Negeri) menyatakan bahwa tak dapat dipungkiri pemusatan pandangan politik diantara lima anggota pendiri ASEAN, pendirian mereka tentang tujuan utama nasional dan tentang bagaimana menjalani tujuan tersebut dalam mengembangkan lingkungan strategis di Asia Timur adalah yang mendorong mereka untuk mendirikan ASEAN.¹

Melihat pernyataan tersebut, tampak bahwa dinamika di Asia Timur turut mempengaruhi negara-negara Asia Tenggara. Secara umum sejak masa perang dingin, negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN menyatakan diri sebagai kawasan non-blok, sebagai zona damai, bebas, dan netral (ZOPFAN). Mereka menyatakan diri pula sebagai kawasan yang bebas dari senjata nuklir dengan penandatanganan perjanjian Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ) pada 1995 dan telah diimplikasikan di 1997. ASEAN menegosiasikan pada Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat agar menghormati perjanjian tersebut. Cina menyatakan diri siap menandatangani protokol tersebut. Jepang tidak termasuk negara yang ada dalam daftar negosiasi ASEAN. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Jepang tidak dianggap sebagai ancaman dari segi senjata nuklir dan perubahan kebijakan pertahanan Jepang pasca perang dingin masih masih ditanggapi positif oleh negara-negara ASEAN.

Perubahan kebijakan pertahanan Jepang pasca perang dingin diamati secara saksama oleh negara-negara yang pernah menderita fisik dan batin akibat kebrutalan tentara Jepang selama separuh abad 19. Jepang menepis ketakutan negara tetangga. "Negara kami, sesuai konstitusi, tetap mengikat diri sebagai negara yang siap membela diri saja (kalau diserang)," demikian kutipan pada rencana perubahan kebijakan pertahanan yang dilaksanakan Jepang, "sesuai dengan kebijakan kami untuk tidak menjadi kekuatan militer utama yang mengancam negara lain, kami akan mengamankan kontrol pada warga."

Pemerintah Jepang tetap mempertahankan sikap tidak memiliki senjata

¹ Rodolfo C. Severino. 2008. ASEAN. Southeast Asia Background Series No. 10. Singapura : ISEAS, hal 13.

nuklir, tidak akan memproduksi, dan tidak akan mengizinkan jenis senjata itu masuk wilayah Jepang, satu-satunya negara yang pernah diserang menggunakan senjata nuklir pada tahun 1945.

Ken Jimbo, Direktur Forum Relasi Internasional Jepang, mengatakan bahwa kebijakan pertahanan Jepang telah menyesuaikan diri dengan era baru. "Rencana baru berisikan perubahan dari sistem pertahanan yang kaku menjadi lebih fleksibel," kata Ken Jimbo.

Rencana itu berisikan program sembilan tahun yang dimulai pada tahun 2005. Di dalam rencana itu sudah termasuk rencana pembelian senjata selama lima tahun pertama sejak tahun 2005.

Perubahan itu telah dijadikan studi dan diluncurkan oleh Sydney Lowly Institute for International Policy, yang ditulis oleh Alan Dupont. Dikatakan, telah terjadi semacam evolusi dan bukan revolusi pada pertahanan Jepang. "Itu tidak terhindarkan karena memang sudah merupakan tuntutan mendasar bagi kesejahteraan di zaman modern," kata Robert Karniol, Editor *Jane's Defence Weekly* untuk wilayah Asia Pasifik di Bangkok.

Akan tetapi, Dupont mengatakan, perubahan baru itu tidak akan membuat Jepang menjadi kekuatan militer yang agresif dengan tujuan memimpin hegemoni Asia. Alasannya, hal itu tampaknya tidak dimungkinkan karena penduduk Jepang yang menua dan demokrasi yang semakin mapan.

Awalnya munculnya Kementerian Pertahanan baru di Jepang, langsung terungkap kritik spontan berbagai pengamat dan elit di kawasan Asia dari China, Korea dan beberapa negara ASEAN dengan rasa khawatir akan mencuatnya kembali kebijakan Asia Timur Raya, semboyan Jepang selama PD II yang wujudnya menyakitkan bangsa Asia masa itu. Namun, banyak kalangan, termasuk elite negeri mau memiliki visi secara lebih dewasa, yakni ikut membangun Asia yang "damai, harmonis dan sejahtera" (*peace, harmonious and prosperous*) secara saling menguntungkan, saling mendukung dan berkaitan (*mutual attraction, mutual support and interdependence*). Tentunya ekspektasi banyak orang Asia, termasuk di negeri ini, adalah sebagai sesama bangsa Asia hendaknya Jepang makin realistis dalam memberi makna dalam diplomasi damainya. Memasuki 2007 dan seterusnya, sebagai abadinya Asia, dalam beraliansi strategis dengan

China, Korea dan ASEAN, maka Jepang dituntut harus lebih terbuka untuk menjadi salah satu unsur kepemimpinan ekonomi di Asia Timur.

The Habibie Center bekerja sama dengan The Japan Foundation dan Kajian wilayah Jepang, Universitas Indonesia menyelenggarakan Forum Diskusi, dengan topik "*Indonesia's Foreign Policy towards the 'Normal' Japan: Stability and Changes*". Forum diskusi itu diselenggarakan Rabu, 12 September 2007.²

Prof. Hideki Kan memaparkan bahwa usaha-usaha untuk membuat Jepang lebih mandiri dapat dilihat dari bagaimana Jepang menampilkan kebijakan luar negeri dan pertahanannya pasca perang dingin. Sejak pemerintahan Perdana Menteri Yoshida Shigeru (1946-1950) Jepang menjadi negara non militer. Hal ini sebagai konsekuensi atas security treaty yang ditandatangani Jepang dan AS. Namun, sejak Januari 2007, Agensi Pertahanan Jepang telah berganti menjadi Kementrian Pertahanan Jepang. Namun, pilihan Yoshida membawa konsekuensi (1) Jepang justru menjadi tergantung pada US dalam hal pertahanan; (2) treaty tersebut inkonsisten dengan Pasal 9 konstitusi Jepang tentang pelucutan senjata.

Selanjutnya, Prof. Dewi Fortuna Anwar dalam presentasinya mengungkapkan bahwa kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia tidak akan berubah walaupun sejak Januari 2007 Jepang telah menjadi negara yang "normal" diantara bangsa-bangsa dunia. "Normalisasi ini maksudnya adalah bergantinya Agensi Pertahanan Jepang menjadi Kementrian Pertahanan Jepang pada Januari 2007 lalu," kata Dewi Fortuna.

Menurut Dewi Fortuna, "Sebelumnya, Jepang dianggap sebagai sebuah negara yang tidak 'normal' karena Jepang adalah negara dengan pengaruh ekonomi dan politik yang cukup besar, namun tidak ditopang dengan kekuatan militer," papar Dewi Fortuna. Isu tersebut, ujarnya bukan merupakan isu penting bagi banyak masyarakat Indonesia karena beberapa alasan sejarah yang terjadi antara Jepang dan Indonesia.

"Walaupun Jepang telah melakukan banyak kekerasan militer di Indonesia pada tahun 1942 hingga 1945, fakta bahwa Jepang telah menghentikan kolonialisme Belanda di Indonesia dan banyak pemuda dan pemimpin militer dilatih oleh Jepang, menjadi salah satu alasan mengapa sikap masyarakat

² <http://www.habibiecenter.or.id/index.cfm>

Indonesia lebih lunak dibandingkan kepada Cina ataupun Korea," katanya.

Sejak penegakan hubungan diplomatik pada tahun 1958, terbentuk hubungan ekonomi yang sangat dekat antara Indonesia dan Jepang: Jepang membayar perbaikan pascaperang, Jepang menjadi donor terbesar, investor utama, dan pasar penting bagi ekspor Indonesia.

Sistem yang terbentuk ini menurut Prof. Kan justru kontradiktif satu dengan yang lainnya dan sering menimbulkan ketegangan dalam politik dan diplomasi Jepang pasca perang dingin. Hal ini juga memunculkan perdebatan panjang antara pendukung "*Kyuju taisei*" dengan "*Ampe taisei*" (*US. Japan treaty*). Prof. Kan juga membahas mengenai warisan negatif diplomasi Yoshida, yang dianggap telah mengabaikan pentingnya suatu usaha untuk menepis "*history question*", sehingga sebagai dampaknya, Jepang semakin sulit membangun basis regionalnya di Asia. Hal ini juga menjadi salah satu faktor mengapa Jepang gagal mencapai kebijakan luar negeri yang independen terhadap AS. Sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut, Prof. Kan mengajukan gagasan untuk membangun ruang politik transnasional dimana di dalamnya dapat dilakukan counter atas logika kerjasama dan bantuan pertahanan dari AS. Dalam hal ini Jepang harus memperkuat hubungannya dengan negara-negara di Asia. Untuk itu Jepang harus mengakui tanggung jawabnya semasa perang Dunia II yang telah banyak membawa kerugian bagi negara-negara di Asia. Banyak orang Jepang sendiri tidak menyadari bahwa Jepang selama ini adalah negara yang terlucuti. Mereka tidak punya tentara, namun dengan demikian mereka juga tidak perlu menanggung beban keamanan, dan dapat fokus terhadap pembangunan ekonomi secara maksimal.

Perubahan resmi Badan Pertahanan Jepang menjadi Kementerian Pertahanan Jepang pada Januari 2007 disebut oleh (mantan) Perdana Menteri Abe Shinzo sebagai 'sebuah peristiwa yang menandai berakhirnya rezim pascaperang dan akan meletakkan dasar membangun negara baru'. Perubahan tersebut berlangsung nyaris tanpa sorotan dari Indonesia. Ini menandakan bahwa 'normalisasi' Jepang bukan menjadi masalah di kalangan orang Indonesia. Setelah 1965 sampai akhir Perang Dingin, Indonesia berada di kelompok antikomunis yang sama dengan Jepang, memandang China sebagai ancaman luar utama.

"Setelah ditandatanganinya perjanjian kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Jepang (EPA) antara kedua pemimpin negara beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, selama Jepang tetap mempertahankan komitmennya terhadap perdamaian dan kerjasama yang baik dengan Indonesia, maka kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Jepang tidak akan berubah," ungkap Dewi Fortuna panjang lebar. Dengan perubahan itu, lanjutnya, Jepang harus meyakinkan kepada seluruh negara tetangganya bahwa dengan menjadi 'normal' tidak berarti Jepang akan kembali pada ideologi militerisme, ekspansionisme ataupun agresionisme. "Jepang juga harus berkomitmen pada piagam PBB serta berbagai hukum internasional. Dengan kedekatannya pada AS, jangan sampai Jepang mengadopsi berbagai kebijakan AS yang dapat menciptakan reaksi negatif terhadap di Jepang dari negara-negara di sekitarnya," tambah Dewi Fortuna. Jepang dan Indonesia di masa depan dapat mengembangkan kerja sama pada wilayah pertahanan seperti bidang militer, karena Jepang memiliki banyak keunggulan teknologi sehingga dimungkinkan adanya transfer teknologi militer.

Perubahan resmi Badan Pertahanan Jepang menjadi Kementerian Pertahanan Jepang pada Januari 2007 disebut sebagai peristiwa yang menandai berakhirnya rezim pascaperang dan sebagai dasar membangun negara baru. Perubahan tersebut nyaris tidak mendapat sorotan dari Indonesia. Ini menandakan bahwa 'normalisasi' Jepang bukan menjadi masalah di kalangan orang Indonesia.

Walaupun merasakan kejamnya pendudukan militer Jepang 1942-1945, sikap Indonesia terhadap sejarah perang Jepang jauh lebih lunak dibanding sikap China dan Korea. Misalnya, Indonesia tidak pernah mempermasalahkan kunjungan PM Jepang ke Yasukuni. Penyebabnya adalah :

- a. Jepang mengakhiri kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia.
- b. Banyak pemuda dan pemimpin militer dilatih oleh Jepang
- c. Sejak penegakan hubungan diplomatik pada tahun 1958, terbentuk hubungan ekonomi yang sangat dekat antara Indonesia dan Jepang
- d. Jepang membayar perbaikan pascaperang, Jepang menjadi donor terbesar, investor utama, dan pasar penting bagi ekspor Indonesia.
- e. Setelah 1965 sampai akhir Perang Dingin, Indonesia berada di

kelompok antikomunis yang sama dengan Jepang, memandang China sebagai ancaman luar utama.

Indonesia menyambut hangat dan mendukung misi pertama Pasukan Perdamaian PBB Jepang. Walaupun begitu, Indonesia sebagaimana negara ASEAN lainnya menolak keras gerakan terhadap proyeksi kekuatan militer pertahanan agresif di pihak Jepang.

Indonesia menentang Amerika Serikat agar Jepang memikul sebagian beban keamanan dan meningkatkan patrol laut pada jarak 1000 nautikal mil, dan melawan keikutsertaan langsung Jepang dalam memastikan keamanan navigasi di Selat Malaka. Indonesia, Malaysia dan Singapura hanya akan menerima bantuan finansial dan teknis untuk meningkatkan kemampuan mereka masing-masing. Kekuatan Jepang diproyeksikan di atas pertahanan negaranya sendiri akan dipandang dengan kecurigaan oleh negara-negara Asia Tenggara.

